

**ANALISIS DAMPAK ISU ETNIS UIGHUR TERHADAP SENTIMEN
ANTI TIONGKOK DARI KALANGAN MUHAMMADIYAH DI
INDONESIA TAHUN 2018-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ARMIANA DYFA RAMITHAMANDA

18323057

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**ANALISIS DAMPAK ISU ETNIS UIGHUR TERHADAP SENTIMEN
ANTI TIONGKOK DARI KALANGAN MUHAMMADIYAH DI
INDONESIA TAHUN 2018-2019
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ARMIANA DYFA RAMITHAMANDA

18323057

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Dampak Isu Etnis Uighur Terhadap Sentimen Anti Tiongkok
dari Kalangan Muhammadiyah di Indonesia Tahun 2018-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

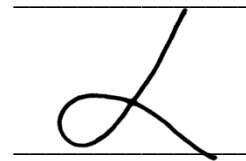
Dewan Penguji

Tanda Tangan

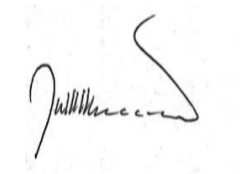
1 Rizki Dian Nursita



2 M. Zulfikar Rahmat



3 Willi Ashadi



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 27 Desember 2021,



Armiana Dyfa Ramithamanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	19
2.1. Pelanggaran HAM Etnis Uighur	19
2.2. Tanggapan Tiongkok Terhadap Pemberitaan Persekusi Etnis Uighur	29
2.3. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Perdamaian Dunia	33
BAB III	40
3.1. Dampak Isu Uighur Menurut Konstruktivisme	40
3.2. Sentimen Anti Tiongkok dari Kalangan Muhammadiyah	42
3.3. Sikap Muhammadiyah sebagai Konstruksi Sosial dari Isu Uighur	49
BAB IV	57
2.1. Kesimpulan	57
2.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1: Rangkuman Dugaan Pelanggaran HAM oleh Tiongkok	25
Gambar 1: Peta Wilayah Xinjiang	21
Gambar 2: Kunjuangan Muhammadiyah ke Xinjiang	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Uighur adalah keturunan dari etnis Turki yang menjadi salah satu etnis asli serta mayoritas di Xinjiang. Etnis Uighur memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat Tiongkok pada umumnya, perbedaan tersebut meliputi perbedaan fisik, budaya hingga keagamaan. Perbedaan tersebut kemudian membuat etnis Uighur menjadi etnis minoritas di Tiongkok (Hidayat 2003). Sebagai kelompok minoritas etnis Uighur mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok dalam aspek ekonomi, kebebasan berpolitik dan berorganisasi hingga kebebasan beragama. Diskriminasi tersebut kemudian menyebabkan etnis Uighur melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan mengadakan unjuk rasa massal di Ghulja pada tahun 1995 dan 1997. Pemberontakan oleh etnis Uighur ini kemudian memperburuk hubungan Uighur dengan pemerintahan Tiongkok. Atas pemberontakan tersebut pemerintah Tiongkok memaksa aktivis-aktivis dari gerakan kemerdekaan Uighur untuk keluar dari Xinjiang ke Asia Tengah dan Pakistan (Karisma 2017). Selain itu, pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semakin merugikan etnis Uighur. Salah satu kebijakan tersebut yakni kampanye “*Strike Hard*” pada tahun 1996. Kebijakan ini digunakan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang dianggap berpotensi sebagai bentuk pemberontakan termasuk kegiatan agama dan organisasi (Ibid).

Pemberitaan terkait kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur mendapatkan berbagai respon dari masyarakat internasional.

Namun negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) cenderung lambat dalam memberikan respon terhadap isu ini. Hal ini kemudian mengundang spekulasi yang menyatakan bahwa negara-negara Muslim di dunia tidak menyuarkan hak kebebasan atas etnis Uighur dikarenakan adanya kerja sama ekonomi yang terjalin antara negara-negara tersebut dengan Tiongkok (Wardah 2019).

Indonesia juga tidak lepas dari spekulasi yang muncul ini, terlebih dengan adanya ketimpangan respon yang diberikan Indonesia antara isu etnis Uighur dengan isu etnis Rohingya dan Palestina (Wardah 2019). Namun dalam laporan yang dibuat oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia beserta organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar yang ada di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah telah mengambil langkah dalam menyikapi isu etnis Uighur dengan melakukan dialog dalam waktu yang berbeda bersama duta besar Tiongkok untuk Indonesia (IPAC 2019). Setelah dilaksanakannya dialog tersebut, kemudian pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam masalah domestik Tiongkok dan meyakini bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok merupakan upaya deradikalisasi dan bukan merupakan pelanggaran HAM. Muhammadiyah juga mengeluarkan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah (Ibid). Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maupun dua ormas tersebut kemudian mengundang dugaan publik. Muncul dugaan bahwa pemerintah Indonesia tidak berani membela etnis Uighur karena adanya investasi dari Tiongkok. Sedangkan dugaan terhadap Muhammadiyah dan ormas Islam

lainnya muncul dari kerja sama kedua ormas Islam tersebut dengan Tiongkok dalam aspek pendidikan (Ibid).

Munculnya dugaan publik sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap respon dari pemerintah Indonesia serta Muhammadiyah ini kemudian menjadi penting untuk diteliti kembali. Terlebih dengan posisi Muhammadiyah yang telah memulai kiprahnya sebagai organisasi perdamaian dunia dengan ikut serta mendamaikan konflik yang ada di Filipina dan juga Thailand (Koran Tempo 2008). Pemberitaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok kepada etnis Uighur tentu saja membangkitkan rasa solidaritas sesama Muslim, antara kalangan Muhammadiyah dengan Muslim Uighur. Dengan adanya isu tersebut dapat mempengaruhi sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah yang diketahui telah memiliki sentimen anti Tiongkok sejak konflik PKI ada di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terkait pengaruh isu etnis Uighur terhadap sikap sentimen anti Tiongkok dari masyarakat Muslim Indonesia terutama kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019. Kemudian penelitian akan ditinjau melalui teori konstruktivisme. Penelitian ini penting dilakukan karena pada studi-studi sebelumnya peneliti lain belum ada yang membahas secara rinci terkait sentimen anti Tiongkok akibat isu etnis Uighur ini (Andika & Damayani, 2020; Fadillah & Jandevi, 2020; Indainanto, 2020; Pradityo, 2020; Zulkarnain & Ghonimah, 2020). Selanjutnya analisis terkait sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menganalisis kritik kalangan Muhammadiyah kepada kerjasama Muhammadiyah dengan Tiongkok sebagai dampak adanya isu Etnis Uighur.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Isu etnis Uighur mempengaruhi sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dampak dari isu etnis Uighur terhadap sikap sentimen anti Tiongkok terutama dari kalangan Muhammadiyah.
2. Menganalisis kritik dari kalangan Muhammadiyah kepada kerjasama antara Tiongkok dan Muhammadiyah.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan pembahasan guna menjaga pembahasan agar tidak terlalu luas. Penulis akan melakukan penelitian hanya seputar dampak isu etnis Uighur terhadap sentimen anti Tiongkok dari Muslim di Indonesia terutama kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019. Isu etnis Uighur yang penulis maksud adalah isu terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dimana menurut KBBI, isu sendiri memiliki dua arti, yang pertama yakni sebuah masalah yang diutamakan. Sedangkan yang kedua yakni kabar yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya serta tidak memiliki

jaminan atas kebenarannya sehingga dapat disebut juga kabar angin atau desas-desus (KBBI). Sesuai dengan pengertian isu menurut KBBI, isu Uighur yang dimaksudkan dalam penelitian ini juga merupakan sebuah permasalahan pelanggaran HAM terhadap warga etnis Uighur yang ramai diperbincangkan atau menjadi berita utama di berbagai negara. Namun permasalahan ini juga masih dalam tahap dugaan dikarenakan bantahan dari terduga pelaku pelanggaran HAM tersebut yakni pemerintah Tiongkok dan belum adanya penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Kemudian penelitian akan difokuskan pada pemberitaan terkait etnis Uighur yang dibahas oleh media maupun warga dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian menurut KBBI, sentimen merupakan pandangan yang muncul berdasarkan suatu perasaan yang berlebihan atau dapat juga diartikan emosional yang berlebihan atau reaksi yang tidak mendukung, dapat juga diartikan sama dengan iri hati, tidak senang atau dendam (KBBI). Sehingga sentimen anti Tiongkok dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai emosi atau perasaan yang tidak senang terhadap negara Tiongkok dikarenakan rasa solidaritas yang kuat antara kalangan Muhammadiyah dengan Muslim Uighur.

Selanjutnya tahun cakupan yang penulis tetapkan yakni 2018-2019 karena pada laporan IPAC, dijelaskan bahwa isu pelanggaran HAM atas etnis Uighur ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2018 (IPAC 2019). Perbincangan tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2019 yang dilanjutkan dengan pemerintah beserta ormas-ormas Islam di Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan dugaan-dugaan negatif dari publik (Ibid).

Sedangkan Muslim Indonesia yang penulis maksud adalah masyarakat Muslim dari kalangan Muhammadiyah yang akan diambil melalui media-media

yang memuat pernyataan dari kalangan Muhammadiyah dan wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah. Penulis menetapkan kalangan Muhammadiyah sebagai aktor dalam penelitian ini dikarenakan pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan beberapa pernyataan terkait isu etnis Uighur ini. Seperti pada bulan Desember 2018, pimpinan Muhammadiyah sempat mengeluarkan surat pernyataan yang berisi tujuh poin sikap Muhammadiyah terhadap isu etnis Uighur (PP Muhammadiyah 2018). Kemudian setelah perwakilan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Xinjiang, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan pernyataan terkait kejanggalan yang ada di Xinjiang melalui laman web suaramuhammadiyah.id (Ribas 2019). Selain pernyataan dari pimpinan Muhammadiyah, tokoh penting Muhammadiyah juga mengeluarkan pernyataan terkait isu ini, seperti mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang mengusulkan agar dibentuknya tim pencarian fakta internasional terkait Uighur (Saputro 2019).

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait isu etnis Uighur dan masyarakat Indonesia pada umumnya atau kalangan Muhammadiyah secara khusus sudah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dani Fadillah dan Uspal Jandevi pada tahun 2020. Dalam jurnal yang berjudul “*Media-Social Behavior of Muhammadiyah Members in China in the Framework of Alexander Wendt’s International Communication Constructivism*” tersebut dibahas bagaimana sikap anggota dan simpatisan Muhammadiyah di Tiongkok dalam menanggapi isu pelanggaran HAM kepada etnis Uighur yang viral di Indonesia

(Fadillah and Jandevi 2020). Anggota dan simpatisan Muhammadiyah Cabang Istimewa Tiongkok berusaha menetralsir isu yang memanas di Indonesia terkait sikap represif pemerintah Tiongkok kepada Uighur. Mereka mengunggah berbagai informasi melalui media sosial terkait umat Islam di Tiongkok yang masih dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan mencoba meyakinkan muslim Indonesia bahwa tidak ada sikap represif pemerintah Tiongkok terhadap umat Islam. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan antara Indonesia dan Tiongkok mengingat banyak mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Tiongkok (Ibid). Penelitian yang telah dilakukan oleh Fadillah dan Jandevi (2020) telah dengan jelas memaparkan sikap kalangan Muhammadiyah di Tiongkok. Namun pada penelitian tersebut, subjek penelitian berupa kalangan Muhammadiyah di Tiongkok merupakan subjek yang sangat sempit. Oleh karena itu, pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan subjek kalangan Muhammadiyah di Indonesia karena mayoritas anggota Muhammadiyah berada di Indonesia.

Selain penelitian terkait anggota Muhammadiyah di Tiongkok, terdapat juga penelitian tentang respon masyarakat umum di Indonesia terkait isu pelanggaran HAM etnis Uighur yang disampaikan melalui media sosial. Penelitian tersebut ditulis oleh Yofiendi Indah Indainanto pada tahun 2020 dengan judul “Relasi Politik, *Bullying* dan Etika Mengenai Isu “Muslim Uighur” di Media Sosial” (Indainanto 2020). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana sikap masyarakat Indonesia yang merespon isu pelanggaran HAM etnis Uighur dengan melakukan *cyberbullying* kepada Mahfud MD melalui komentar pada akun twitter Mahfud MD. Beberapa komentar tersebut menyudutkan Mahfud MD terkait lemahnya sikap Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan dalam menanggapi isu pelanggaran HAM kepada etnis Uighur (Ibid). Penelitian ini telah menunjukkan bagaimana sentimen publik terhadap keputusan pemerintah yang kurang memuaskan dalam menanggapi isu etnis Uighur. Namun dalam penelitian ini belum dibahas sentimen publik terhadap Tiongkok, sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM etnis Uighur. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis berusaha mempersempit pembahasan mengenai sentimen anti Tiongkok dengan tidak meneliti masyarakat secara umum namun hanya berfokus pada kalangan Muhammadiyah.

Selain penelitian terkait masyarakat dan organisasi, terdapat juga penelitian yang ditulis oleh Rahmadanu Pradityo pada tahun 2020 dengan judul “Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019”. Pada penelitian tersebut dijelaskan perbedaan sikap Indonesia kepada isu etnis Rohingya di Myanmar dan juga isu etnis Uighur di Tiongkok (Pradityo, Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019 2020). Perbedaan tersebut muncul akibat dipengaruhi oleh identitas dan kepentingan yang Indonesia miliki kepada kedua negara. Penelitian tersebut menggunakan teori konstruktivisme sehingga menyatakan bahwa konstruksi sosial yang disebabkan interaksi sosial di Indonesia berubah dengan begitu cepat. Hal ini menyebabkan perubahan identitas dan kepentingan Indonesia berjalan dengan begitu cepat mengikuti dinamika dunia internasional (Ibid). Penelitian ini telah memaparkan dengan jelas sikap yang ditunjukkan Indonesia terhadap isu etnis Rohingya dan etnis Uighur menggunakan teori konstruktivisme. Namun penelitian ini belum membahas bagaimana dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi isu etnis Uighur ini terhadap sentimen publik. Oleh sebab itu, penulis akan mencoba lebih berfokus

pada sentimen anti Tiongkok yang muncul karena respon yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini.

Tidak hanya penelitian terkait respon Indonesia mengenai isu etnis Uighur, namun juga terdapat penelitian yang membahas seputar respon negara lain serta organisasi internasional terhadap isu ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah pada tahun 2020 dengan judul “Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-20015)” (Zulkarnain and Ghonimah 2020). Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa Turki memberikan beberapa respon terkait isu pelanggaran HAM ini. Respon tersebut setidaknya dilakukan dengan dua cara yakni verbal dan non-verbal. Secara verbal Turki melakukan kunjungan ke pemerintah Tiongkok, mengeluarkan pernyataan terkait isu tersebut dan mengeluarkan kebijakan anti Tiongkok. Turki juga memberikan respon secara non-verbal dengan mengadakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Turki, Pemerintah Turki juga menerima pengungsi Uighur. Namun hubungan antara Turki dan Tiongkok kemudian membaik dengan adanya pelatihan militer gabungan antara Tiongkok dan Turki (Ibid). Penelitian terkait respon Turki atas isu etnis Uighur ini telah dijelaskan secara komprehensif. Namun penelitian ini hanya membahas isu etnis Uighur pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Sedangkan di Indonesia, isu etnis Uighur memanas pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2019. Oleh sebab itu, penulis memberikan cakupan penelitian pada tahun 2018 hingga tahun 2019.

Respon organisasi internasional ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Tri Andika dan Elcy Damayani pada tahun 2020 yang berjudul “Sikap

Lunak OKI dalam Pelanggaran HAM Kelompok Uighur”. Penelitian ini menyoroti bagaimana sikap OKI yang terkesan melunak terhadap pelanggaran HAM oleh Tiongkok kepada etnis Uighur yang merupakan masyarakat Muslim di Tiongkok (Andika and Damayani 2020). Sikap lunak tersebut ditunjukkan dalam pernyataan OKI yang tidak mengandung kritikan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tiongkok serta pada minimnya OKI memberikan informasi terkait pelanggaran HAM ini. Lunaknya respon yang diberikan oleh OKI ini kemudian disimpulkan dalam artikel ini disebabkan oleh adanya hubungan tradisional antara OKI dan Tiongkok dalam isu Palestina dan juga karena adanya kerja sama ekonomi OKI dan juga Tiongkok. Kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara di Timur Tengah ini selalu mengedepankan sikap pembangunan damai sehingga meminimalisir kemungkinan adanya sikap yang mencederai kerja sama tersebut (Ibid). Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa organisasi internasional pun tidak memberikan respon yang tegas terhadap isu etnis Uighur ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mencoba menelaah respon yang diberikan oleh organisasi nasional Indonesia yang berdampak pada sikap para anggotanya yakni organisasi Muhammadiyah.

Sesuai pemaparan diatas, belum ditemukan penelitian terkait dampak isu etnis Uighur terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019 dengan menggunakan teori konstruktivisme sebagai teori untuk menganalisis permasalahan ini. Oleh karena itu penulis akan menganalisis apakah isu etnis Uighur tersebut berpengaruh terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah di Indonesia dengan menggunakan teori konstruktivisme khususnya pada tahun 2018-2019.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori konstruktivisme untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang muncul setelah Perang Dunia II, dimana munculnya Perang Dingin sebagai hasil dari berakhirnya Perang Dunia II belum dapat dijelaskan oleh para sarjana HI dengan teori-teori dominan sebelumnya. Konstruktivisme jika didefinisikan secara luas menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terjadi antara aktor negara maupun non-negara sehingga membentuk sebuah struktur internasional (Dunne, Kurki and Smith 2013).

Seorang pemikir konstruktivisme yakni Michael Barnett menjelaskan konstruktivisme memandang bahwa dunia dipengaruhi oleh pemikiran atau ideasional. Pemikiran tersebut memiliki sifat sosial karena dibentuk secara kolektif melalui pengetahuan, bahasa, aturan dan simbol. Idealisme konstruktivis kemudian tidak menolak adanya realitas material, sebaliknya menganalisis makna dan konstruksi realitas dari pemikiran dan interpretasi. Dalam konstruksi realitas sendiri terdapat penekanan terhadap sifat aktor yang membangun identitas dan kepentingan mereka (Barnett 2008).

Kemudian konstruktivisme juga meyakini holisme atau strukturalisme yang meyakini bahwa tiap aktor merupakan suatu keutuhan yang memiliki otonomi dan interaksi mereka dapat membangun, memproduksi dan mengubah struktur tersebut. Dalam perubahan struktur tersebut, Barnett menjelaskan setidaknya terdapat dua instrumen yang dapat dijadikan penyebab yakni *internationalization* dan *institutionalization of norms* (Barnett 2008).

Internationalization disebabkan oleh adanya isu *isomorphism institution* yakni kondisi dimana para aktor memiliki kesamaan sikap karena adanya pengaruh dari aktor dominan atau dengan lain suatu kondisi dimana aktor dominan memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruhnya kepada aktor lain. Sedangkan *institutionalization of norms* merupakan faktor perubahan global yang diakibatkan adanya norma yang membatasi perilaku suatu aktor sekaligus menjadikan para aktor memiliki tanggung jawab untuk melindungi norma tersebut (Barnett 2008).

Konstruktivisme memiliki fokus pada ontologi sosial dimana para konstruktivis meyakini bahwa sebagai makhluk sosial, individu maupun negara tidak dapat memisahkan diri dari konteks normatif yang membentuk identitas diri mereka dan segala kemungkinan yang akan terjadi bagi mereka (Dunne, Kurki and Smith 2013). Namun meskipun tidak dapat dipisahkan dengan konteks normatif tersebut, dalam teori konstruktivisme dikatakan bahwa setiap perilaku individu maupun negara memiliki batasan berupa norma-norma seperti norma hak asasi manusia yang membatasi segala kekuasaan di tingkat nasional maupun internasional (ibid).

Dari teori konstruktivisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku aktor di suatu tempat dapat mempengaruhi pemikiran aktor di tempat lain, dimana pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi struktur internasional. Gagasan tersebutlah yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Setidaknya terdapat empat instrumen yang ada pada teori konstruktivisme menjadikan teori ini tepat digunakan untuk menganalisis permasalahan pengaruh isu etnis Uighur terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah ini, yakni *pertama*, idealisme atau pemikiran. Sentimen anti Tiongkok dari

kalangan Muhammadiyah merupakan suatu pemikiran dari konstruksi sosial yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok. *Kedua, internationalization*. Tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dapat mempengaruhi Muhammadiyah dalam mengeluarkan kebijakan maupun melakukan suatu tindakan kepada pemerintah Tiongkok. *Ketiga, strukturalisme*. Pemikiran dari kalangan Muhammadiyah, identitas Muhammadiyah serta kepentingan Muhammadiyah dengan Tiongkok dapat digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengatur struktur politik antara Muhammadiyah dengan Tiongkok. *Keempat, institutionalization of norms*. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berusaha menjaga perdamaian dunia termasuk juga menjaga hak asasi manusia mencoba untuk memberikan saran kepada pemerintah Tiongkok untuk menghentikan persekusi yang dilakukan.

Teori konstruktivisme kemudian membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana isu etnis Uighur yakni isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dapat mempengaruhi pemikiran dari kalangan Muhammadiyah sehingga timbul sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah di Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa perilaku maupun isu internasional dapat berpengaruh terhadap individu maupun aktor non-negara di tempat lain.

1.7 Argumen Sementara

Penulis menetapkan argumen sementara bahwa isu etnis Uighur berpengaruh terhadap sentimen anti Tiongkok yang telah ada di kalangan

Muhammadiyah dengan menumbuhkan sentimen anti Tiongkok dengan variasi yang baru, dimana bentuk dari sentimen tersebut adalah kritikan dan unjuk rasa dari kalangan Muhammadiyah.

1.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan data yang kredibel dan dapat diolah menjadi sebuah informasi yang mendukung penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut dalam penelitian ini:

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian *discourse analysis*. Penelitian *discourse analysis* menurut Stubs merupakan suatu penelitian yang menganalisis bahasa secara ilmiah, baik disampaikan secara tertulis maupun lisan. Penggunaan penelitian ini lebih ditekankan pada jenis penelitian sosial, khususnya digunakan dalam interaksi antar satu aktor dengan aktor lainnya (Eriyanto 2006). Dengan menggunakan *discourse analysis* penulis akan meneliti media-media yang memuat pernyataan dari kalangan Muhammadiyah untuk mempelajari apakah isu etnis Uighur dapat menimbulkan sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan kalangan Muhammadiyah di Indonesia sebagai subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan objek

penelitian berupa dampak dari adanya isu etnis Uighur yang mendapat pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik kepustakaan serta wawancara. Teknik kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti berhadapan secara langsung dengan teks-teks yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan (Zed 2008). Pada teknik ini, penulis menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan dan artikel media yang relevan dengan isu etnis Uighur dan sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah untuk melengkapi data-data pada penelitian ini.

Sedangkan wawancara adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait fakta, perasaan, kepercayaan, keinginan dan lainnya dengan cara responden dan peneliti berinteraksi secara langsung (Rosaliza 2015). Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa tokoh Muhammadiyah untuk mendapatkan informasi terkait sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan media-

media yang memuat pernyataan dari kalangan Muhammadiyah serta mewawancarai tokoh Muhammadiyah. Kemudian setelah pengumpulan informasi tersebut, dilakukan analisis terkait pernyataan-pernyataan dari kalangan Muhammadiyah tersebut. Hasil analisis data-data tersebut kemudian digunakan untuk menjawab segala permasalahan terkait dampak isu etnis Uighur terhadap sikap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah pada tahun 2018-2019.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri lima bab yang telah disusun oleh penulis, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I terdapat pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah yang menunjukkan fokus penelitian, tujuan penelitian yang berisi maksud dari penelitian ini, signifikansi penelitian yang membuktikan bahwa penelitian ini penting dilakukan, cakupan penelitian yang menunjukkan batas-batas dari penelitian ini, tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, landasan teori yang diterapkan untuk menganalisis permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan serta analisis data pada penelitian ini.

BAB II: PELANGGARAN HAM ETNIS UIGHUR

Pada bab II yakni konteks, penulis berusaha memberikan informasi-informasi sebagai pengantar sebelum pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Informasi-informasi tersebut berupa pemahaman lebih dalam terkait isu etnis Uighur yang mendapat pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok, tanggapan dari kalangan Muhammadiyah terkait isu tersebut serta sikap sentimen anti Tiongkok yang muncul dari kalangan Muhammadiyah yang dipengaruhi oleh isu tersebut. Pada bab ini juga dijelaskan teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, pada bab ini juga akan dijelaskan terkait teori konstruktivisme yang akan digunakan untuk mengkaji sikap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah.

BAB III: RESPON KALANGAN MUHAMMADIYAH TERKAIT ISU ETNIS UIGHUR

Bab III merupakan bab yang membahas tentang hasil analisis atau temuan yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian di lapangan. Bab ini dapat dikatakan sebagai bab inti pada penelitian ini. Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari *discorse analysis* terhadap pernyataan-pernyataan kalangan Muhammadiyah yang dimuat di media terkait pengaruh isu etnis Uighur terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas terkait aspirasi kalangan Muhammadiyah terkait hubungan Indonesia dan Tiongkok. Hasil analisis ini merupakan hasil orisinal yang diperoleh oleh

penulis dengan harapan dapat membantu perkembangan ilmu hubungan internasional secara umum.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian penutup akan diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diperoleh penulis setelah melakukan penelitian ini. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran-saran yang diajukan oleh penulis sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional.

BAB V: DAFTAR PUSTAKA

Bab akhir dari penelitian ini berisi daftar Pustaka atau daftar dari referensi-referensi yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian ini. Referensi tersebut berupa buku, jurnal, laporan maupun artikel media.

BAB II

DINAMIKA ISU ETNIS UIGHUR DAN RESPON KALANGAN

MUHAMMADIYAH

Pada bab ini penulis akan membahas seputar isu etnis Uighur yang diduga mendapat pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok sehingga mendapat perhatian dari masyarakat internasional yang kemudian berdampak pada sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah di Indonesia

Bab ini akan dibagi ke dalam tiga pembahasan. Pembahasan pertama akan membahas seputar isu Uighur yang diduga mendapatkan pelanggaran HAM serta perbincangan seputar isu Uighur di masyarakat Internasional. Selanjutnya pembahasan kedua akan membahas terkait upaya dan sikap pemerintah Tiongkok dalam membantah isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Terakhir pada pembahasan ketiga akan dibahas beberapa argumen dari kalangan Muhammadiyah terkait isu etnis Uighur ini.

2.1. Pelanggaran HAM Etnis Uighur

Hak asasi manusia merupakan sebuah hak alamiah yang dimiliki manusia bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak tersebut menghindarkan manusia untuk mendapat pelecehan, pembatasan atau pengucilan atas dasar perbedaan agama, ras, kelompok, suku, etnis, golongan, status ekonomi, status sosial, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik yang mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan menjalani kehidupan, baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik

dan bidang kehidupan lain (Begem, Qamar and Bahruddin 2019). Oleh karena pentingnya hak asasi manusia untuk dilindungi dan dihormati maka pada tahun 1948 majelis umum PBB memproklamkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan seputar pokok-pokok bahasan terkait kebebasan, pemilikan harta, persamaa, hak kerja, hak dalam perkawinan serta kebebasan beragama (ibid). Namun meskipun telah dideklarasikan sejak berpuluh-puluh tahun lalu, hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia masih tetap terjadi di beberapa tempat. Kehidupan sosial di masyarakat seringkali menimbulkan bentrokan kepentingan sehingga terjadi pelanggaran HAM atas manusia lainnya. Pelanggaran HAM tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi dua yakni pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat terhadap HAM sesuai dengan pasal 5 yang tertuang dalam Statuta Roma terkait Kejahatan yang Termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah di antaranya adalah kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi serta kejahatan terhadap kemanusiaan (Mahkamah Pidana Internasional 1998). Sedangkan pelanggaran ringan merupakan tindakan-tindakan yang melanggar HAM selain jenis-jensi pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran berat.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur yang diduga dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sendiri telah terjadi sejak beberapa puluh tahun lalu. Dimulai sejak pemerintah komunisme Tiongkok menduduki wilayah Turkistan Timur atau yang kini dikenal sebagai wilayah Xinjiang (seperti yang tertera di *Figure 1*). Wilayah yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tersebut resmi diambil alih oleh pemerintah komunisme pada tahun 1949, sejak saat itu terjadi pemindahan penduduk etnis Han yang dilakukan dalam skala besar

sehingga menyebabkan etnis Han menjadi mayoritas penduduk di wilayah Xinjiang. Mulai dari saat itu pelaksanaan pemerintahan dan politik dijalankan oleh etnis Han yang merupakan etnis asli Tiongkok sedangkan etnis Uighur menjadi penduduk kelas dua di wilayah tersebut. Pelanggaran HAM dimulai dengan pelarangan penggunaan bahasa local etnis Uighur. Diketahui bahwa etnis Uighur dalam berkegiatan sehari-hari menggunakan bahasa lokal dan Turkmen sedangkan dalam menulis etnis Uighur menggunakan tulisan bahasa Arab. Penggunaan bahasa tersebut kemudian dilarang oleh pemerintah Tiongkok. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur kemudian terus berlangsung termasuk pelanggaran berat berupa kejahatan kemanusiaan (Hidayat 2003).

Gambar 1: Peta Wilayah Xinjiang



Sumber: (BBC News Indonesia 2018)

Etnis Uighur diduga telah mendapatkan berbagai pelanggaran HAM dari pemerintah Tiongkok, tidak terkecuali pelanggaran-pelanggaran yang menjurus terhadap kejahatan genosida. Menurut statuta roma, genosida merupakan tindakan menghancurkan sebagian atau keseluruhan suatu kelompok atau etnis tertentu. Tindakan tersebut meliputi membunuh anggota etnis, melukai fisik dan mental yang serius, secara sengaja menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan atas

keberlangsungan hidup etnis tersebut, mencegah kelahiran dalam etnis tersebut serta memindahkan secara paksa keturunan dari etnis tersebut (Mahkamah Pidana Internasional 1998). Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok telah menunjukkan upaya kejahatan genosida untuk menghancurkan etnis Uighur. Seperti upaya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam kejadian berdarah 5 Juli 2009, dimana peristiwa tersebut menewaskan 200 orang serta melukai 1.700 orang dan semua korban tersebut merupakan etnis Uighur. Namun dari kejadian tersebut, pemerintah Tiongkok justru menjadikan etnis Uighur sebagai kambing hitam yang menyebabkan kemarahan dari etnis Han (Saragih 2015). Selain itu, upaya pemerintah Tiongkok dengan menerapkan aturan keluarga berencana juga dianggap sebagai upaya dalam melakukan *ethnic cleansing* dikarenakan rendahnya pertumbuhan populasi etnis Uighur yang hanya mencapai 15,9% jika dibandingkan dengan pertumbuhan populasi etnis Han yang mencapai 31,6% (ibid). Selain kebijakan keluarga berencana, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa dalam kamp-kamp pelatihan di Xinjiang, pemerintah Tiongkok juga memaksa perempuan-perempuan Uighur untuk melakukan aborsi, menanam alat kontrasepsi serta menaburkan bubuk cabai ke permukaan kelamin mereka untuk menghentikan reproduksi etnis Uighur. Pemerintah Tiongkok juga dituduh telah memisahkan anak-anak Uighur dengan orang tua mereka dan mengirimkan anak-anak tersebut ke sekolah atau panti asuhan untuk mendoktrin mereka dan menanamkan paham-paham komunis (Sekarwati 2019).

Selain genosida, etnis Uighur juga telah mengalami penderitaan dari berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dalam statute roma dijelaskan tindakan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan

antara lain perbuatan terhadap suatu kelompok berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa atas sekelompok penduduk, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan atas suatu kelompok yang didasarkan atas politik, etnis, suku, ras, nasional, budaya, agama atau gender, penghilangan secara paksa, kejahatan apartheid serta perbuatan yang tidak manusiawi yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan penderitaan berat atau luka serius pada kesehatan fisik maupun mental (Mahkamah Pidana Internasional 1998). Pemerintah Tiongkok telah memberlakukan berbagai kebijakan yang merugikan etnis Uighur dan telah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan seperti pengadaan kamp-kamp pelatihan yang telah merenggut berbagai macam hak asasi manusia etnis Uighur. Pemerintah Tiongkok diduga telah menahan sekitar 1 juta warga etnis Uighur untuk tinggal dan menjalani berbagai kegiatan di kamp-kamp yang disediakan oleh pemerintah Tiongkok. Penahanan tersebut dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tanpa adanya dakwaan ataupun pengadilan terhadap warga Uighur, adapun dalam Undang-Undang terkait kamp pelatihan tersebut dijelaskan beberapa alasan yang dapat menyebabkan warga Uighur ditahan dalam kamp pelatihan diantaranya adalah menyebarkan informasi terkait konsep makanan halal, enggan menonton TV maupun mendengarkan radio pemerintah serta mencegah anak-anak etnis Uighur untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah (BBC NEWS Indonesia 2018). Dalam kamp tersebut juga diajarkan bahasa resmi Tiongkok dan lagu kebangsaan Tiongkok serta berbagai slogan terkait partai komunis. Hal-hal tersebut diajarkan agar warga etnis Uighur menghilangkan identitas dan kebudayaan Uighur serta meninggalkan kepercayaan mereka kemudian dapat berdedikasi pada partai komunis Tiongkok (Abdurasulov 2019). Menurut salah satu bekas tahanan kamp

tersebut, didalam kamp, setiap lelaki dan perempuan mendapatkan pelecehan seksual. Bahkan mantan tahanan tersebut sempat hamil 2 kali dalam kamp tersebut karena diperkosa oleh penjaga kamp dari etnis Han (Sekarwati 2019). Selain itu pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak etnis Uighur dalam melaksanakan ibadah mereka. Etnis Uighur dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, bahkan seluruh restoran dan tempat makan di Xinjiang diharuskan untuk tetap buka pada bulan Ramadhan serta warga dihimbau untuk mencegah siswa dan guru melakukan aktivitas keagamaan di masjid. Etnis Uighur juga dilarang memberikan nama anak mereka dengan nama-nama Islami seperti Mohammed atau Madina. Larangan menggunakan hijab dan memelihara jenggot juga diterapkan oleh pemerintah Tiongkok kepada etnis Uighur. Pemerintah Tiongkok juga menugaskan warga etnis Han untuk tinggal dirumah-rumah etnis Uighur dan melaporkan segala tindakan yang menunjukkan sikap ekstrimisme menurut mereka termasuk berpuasa dan menghindari minuman yang mengandung alkohol, untuk menyulitkan etnis Uighur dalam mencari makanan, pemerintah Tiongkok juga melarang penjual menjual makanan halal sepanjang wilayah Xinjiang (CNN Indonesia 2019). Selain kebijakan yang menekan aktivitas keagamaan etnis Uighur pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi etnis Uighur. Diskriminasi tersebut berupa jaminan hak atas politik dan roda perekonomian di wilayah Xinjiang kepada etnis Han, namun sebaliknya hak tersebut tidak didapatkan oleh etnis Uighur. Jabatan-jabatan di jajaran pemerintahan dikuasai oleh warga etnis Han serta sulitnya etnis Uighur untuk mendapat pekerjaan yang layak di Tiongkok (Dewi and

Masrur 2020). Dugaan Pelanggaran HAM oleh Tiongkok akan penulis rangkup dalam table berikut:

Tabel 1: Rangkuman Dugaan Pelanggaran HAM oleh Tiongkok

Jenis Pelanggaran	Indikator	Tindakan
Genosida	Membunuh dan melukai anggota etnis	Propaganda peristiwa 5 Juli 2009 yang menewaskan 200 orang dan melukai 1.700 orang warga Uighur
	Menimbulkan keadaan tidak menguntungkan	Menjadikan kambing hitam dalam peristiwa 5 Juli 2009
	Mencegah kelahiran dalam etnis	Kebijakan keluarga berencana dalam prosentase kelahiran yang rendah
	Memindahkan keturunan secara paksa	Memisahkan anak-anak Uighur dari orang tuanya dan memindahkannya ke sekolah atau panti asuhan
Kejahatan kemanusiaan	Pembunuhan	Peristiwa 5 Juli yang menewaskan banyak korban etnis Uighur
	Pemindahan secara paksa	Penahanan secara paksa atas dasar keagamaan di kamp pelatihan
	Pemeriksaan	Pemeriksaan pada wanita Uighur di kamp Pelatihan
	Penganiayaan berdasarkan agama	Larangan melaksanakan ibadah sholat, puasa serta larangan menjual makanan halal, menamai anak

		dengan nama islami, memelihara jenggot dan memakai hijab.
	Penganiayaan berdasarkan budaya	Larangan menggunakan bahasa asli Uighur, paksaan pelatihan bahasa mandarin dan penanaman secara paksa prinsip-prinsip komunis
	Penganiayaan berdasarkan politik	Tidak adanya kesempatan etnis Uighur untuk menduduki jabatan pemerintahan di Xinjiang serta diskriminasi ekonomi dengan mempersempit lingkup kerja etnis Uighur
	Kejahatan Apherteid	Penempatan etnis Han untuk tinggal di rumah etnis Uighur guna mengawasi aktifitas etnis Uighur

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tersebut telah dilaporkan oleh Amnesty Internasional yang menyatakan bahwa ada lebih dari 1 juta warga etnis Uighur yang ditahan dengan cara sewenang-wenang, dieksploitasi, didoktrin dan ditempatkan di kamp dengan pengawasan tinggi. Amnesty Internasional kemudian mengeluarkan beberapa tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Tiongkok, antara lain:

- a) Meminta pemerintah Tiongkok untuk menutup seluruh kamp dan membebaskan warga yang ditahan di sana.

- b) Menghentikan seluruh kegiatan yang melanggar hak asasi manusia dalam kamp tersebut.
- c) Mencabut Undang-Undang terkait kamp tersebut serta Undang-Undang yang membatasi kebebasan etnis Uighur.
- d) Memberhentikan aktifitas pemerintah Tiongkok yang meminta negara lain untuk memulangkan warga negara Tiongkok yang diduga melanggar prinsip non-refoulement.
- e) Memberikan akses kepada pihak luar yang berwenang terhadap penyelidikan pelanggaran HAM untuk berkunjung ke Xinjiang dan melakukan investigasi di tempat pelanggaran HAM (Jamali 2020).

Atas laporan yang ditulis oleh Amnesty Internasional, Amerika Serikat yang didukung oleh Kanada, Jerman, Inggris dan Belanda serta didukung lebih dari 30 negara, perwakilan organisasi Uni Eropa dan juga 20 organisasi non-pemerintah lainnya sepakat untuk terus mengangkat isu pelanggaran HAM etnis Uighur dan memastikan bahwa PBB dapat memonitori pelanggaran HAM yang ada di Tiongkok. Upaya tersebut diharapkan dapat menghentikan aktifitas Tiongkok yang melanggar hak asasi manusia etnis Uighur (CNN Indonesia 2019). Berbeda dengan organisasi Amnesty Internasional dan berbagai negara barat lainnya, organisasi yang menaungi negara-negara Muslim di dunia justru cenderung memberikan respon yang lunak terhadap pelanggaran HAM kepada etnis Uighur. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tersebut justru membela kebijakan Tiongkok dengan mendukung pernyataan Tiongkok yang menyatakan kamp-kamp pertahanan tersebut diadakan untuk menghindari tindakan teorisme. OKI juga terlihat tidak terlalu mengekspos pemberitaan terkait isu ini di negara-negara anggotanya, hal

tersebut semakin menunjukkan betapa lunaknya respon OKI terhadap isu pelanggaran HAM ini. Hal tersebut kemudian mengundang spekulasi yang menyatakan OKI tidak berani untuk menentang kebijakan Tiongkok yang melanggar HAM etnis Uighur dikarenakan eratnya jalinan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dengan negara-negara anggota OKI. OKI disinyalir takut kehilangan berbagai proyek besar yang menjadi kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota dengan Tiongkok seperti OBOR atau BRI serta proyek Tiongkok yang menjadikan wilayah Timur Tengah sebagai fokus kebijakan negaranya. Dalam kerjasama Tiongkok dan negara Muslim yang tergabung dalam OKI, terdapat prinsip *developmental peace* dengan pendekatan non-intervensi, *partnership* serta *mutual benefit*. Dengan prinsip tersebut, ketika terjadi permasalahan antara kedua pihak, maka kedua pihak akan kembali pada prinsip tersebut dan menyelesaikan perkara dengan damai (Jamali 2020). Indonesia sebagai salah satu negara anggota OKI dengan mayoritas penduduk beragama Islam juga menunjukkan respon yang serupa. Indonesia menganggap Uighur sebagai etnis yang melakukan tindakan separatis sehingga pemerintah Indonesia menganggap konflik antara pemerintah Tiongkok dengan etnis Uighur merupakan sebuah isu domestik. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak ingin terlibat terlalu jauh terhadap permasalahan domestik Tiongkok. Langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok tentunya tidak mengherankan, mengingat investasi besar hingga US\$ 1,1 miliar dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Besarnya peranan Tiongkok dalam menjalankan kerjasama dan investasi dengan Indonesia tentunya menjadikan Indonesia tidak ingin adanya permasalahan yang merusak hubungan

antar kedua belah pihak (Pradityo, INDONESIA DI ANTARA MASALAH ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS UIGHUR, 2014-2019 2020).

2.2. Tanggapan Tiongkok Terhadap Pemberitaan Persekusi Etnis Uighur

Berbagai tuduhan yang tertuju pada Tiongkok sebagai terduga pelaku pelanggaran hak asasi manusia atas etnis Uighur mengundang reaksi dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kebijakan yang dikeluarkan semata-mata hanya untuk mencegah adanya separatis dan ekstrimisme. Diketahui konflik internal antara etnis Uighur dengan etnis Han telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Konflik tersebut kemudian memanas pada tahun 2009, dimana terjadi serangan dari etnis Han kepada etnis Uighur yang menewaskan 2 warga Uighur. Penyerangan tersebut dikarenakan kabar hoaks tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh pemuda Uighur terhadap seorang wanita asal etnis Han. Atas konflik tersebut tercetuslah kerusuhan besar yang menewaskan dan melukai banyak pihak di ibu kota Urumqi (Meancilla 2020). Sejak konflik tersebut, pemerintah Tiongkok terus memperketat pengawasan terhadap etnis Uighur karena kekhawatiran adanya tindakan separatis dari etnis Uighur untuk melepaskan Xinjiang dari kedaulatan Tiongkok. Dengan prinsip *one china policy*, Tiongkok tidak akan membiarkan Xinjiang lepas dari wilayah kedaulatan Tiongkok (Ibid). Selain khawatir etnis Uighur akan melakukan tindakan separatis, pemerintah Tiongkok juga mempertimbangkan isu Islamofobia yang telah muncul di Tiongkok sejak kejadian 9/11 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya ekstrimisme, pemerintah Tiongkok memberlakukan berbagai larangan terhadap kegiatan peribadahan umat Islam yang memungkinkan tindakan ekstrimisme

seperti memelihara jenggot, menggunakan hijab, hingga menjalankan ibadah puasa Ramadhan (Ibid). Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok adalah dengan mengadakan kamp pelatihan yang mengajarkan bahasa RRT kepada etnis Uighur serta berbagai kebudayaan Tiongkok lainnya untuk memperkuat rasa nasionalisme dari etnis Uighur (Ibid).

Namun upaya Tiongkok dengan pengadaan kamp-kamp pelatihan dan kebijakan Tiongkok lainnya kemudian diduga sebagai tindakan pelanggaran HAM oleh banyak pihak termasuk Amnesty Internasional, PBB hingga berbagai negara barat. Guna menjawab segala kecurigaan dan tuduhan kepada Tiongkok, pemerintah Tiongkok kemudian membuka wilayah Xinjiang agar dapat dikunjungi oleh beberapa pihak. Pemerintah Tiongkok kemudian mengundang beberapa pihak untuk melakukan kunjungan seperti mengundang delegasi diplomat Uni Eropa, mengundang para jurnalis dari berbagai negara, hingga mengundang perwakilan pemerintah serta organisasi masyarakat Indonesia. Pemerintah Tiongkok mengundang delegasi diplomat Uni Eropa untuk mengunjungi wilayah Xinjiang pada tahun 2019, namun kunjungan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan permintaan para diplomat Uni Eropa yang tidak dapat diterima oleh pemerintah Tiongkok. Diplomat Uni Eropa telah sepakat untuk menjalani kunjungan ke Xinjiang dan meminta untuk bertemu dengan seorang mantan pejabat Tiongkok yang saat ini dipenjara karena dianggap melanggar hukum Tiongkok. Mantan pejabat tersebut adalah Tohti seorang ekonom asal etnis Uighur yang juga penerima hadiah Sakharov atau penghargaan hak asasi manusia paling tinggi dari Uni Erpa pada tahun 2019. Ia sejak tahun 2014 dipenjara karena tuduhan separatisme (Sabiila 2021). Pemerintah Tiongkok juga turut mengundang para jurnalis untuk berkunjung

dan melihat apa yang terjadi di Xinjiang dan kamp-kamp pelatihan disana. Menurut Federasi Wartawan Internasional (IFJ) undangan dari pemerintah Tiongkok merupakan sebuah upaya untuk membendung pemberitaan negatif yang sedang marak diberitakan oleh media internasional. Dalam survei yang dilakukan oleh IFJ, dalam kunjungan ke Xinjiang, sebagian wartawan diajak untuk berkeliling dan mengunjungi tempat-tempat yang digunakan sebagai zona teknologi dan beberapa pabrik dengan fasilitas yang canggih. Selain itu sebagian wartawan lainnya diajak untuk berkeliling menikmati keindahan alam dan ditunjukkan upaya Tiongkok dalam menangani teroris. Sedangkan sebagian lainnya dibawa oleh pihak pemerintah Tiongkok untuk diperlihatkan bahwa Tiongkok menjadikan wilayah Xinjiang sebagai daerah tujuan wisata dan diceritakan kisah sukses terkait pembangunan ekonomi Tiongkok. Upaya tersebut dapat dikatakan berhasil setelah berbagai artiket mengangkat berita kesuksesan Tiongkok dalam membangun ekonomi (Susilo 2020). Namun seorang wartawan senior bernama Olsi Jazexhi yang berkunjung ke Xinjiang pada Agustus 2019 mengatakan kamp-kamp pelatihan yang didirikan oleh pemerintah Tiongkok lebih tepat disebut kamp konsentrasi untuk menghilangkan identitas Muslim warga etnis Uighur. Dalam kunjungan tersebut Jazexhi bertemu seorang perempuan bernama Kurikumal Maula Turdi yang ditahan dalam kamp tersebut karena mengikuti kelas Quran dan juga seseorang bernama Tokniaz yang juga ditahan karena melihat video terkait sholat lima waktu. Ia pun menambahkan bahwa kamp tersebut mendoktrin tahanannya untuk meyakini bahwa percaya pada Tuhan merupakan sebuah kesalahan (Ibid). Berbeda cerita dengan delegasi Uni Eropa maupun kunjungan para jurnalis, kunjungan delegasi dari Indonesia memberikan tanggapan tersendiri terkait kamp

pelatihan di Xinjiang. Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah. Setelah kunjungan tersebut, perwakilan MUI memberikan pernyataan bahwa dalam kunjungan tersebut, delegasi dari Indonesia telah mempelajari aktifitas yang ada di Xinjiang termasuk aktifitas dalam kamp pelatihan. Kunjungan tersebut kemudian menghadirkan kesimpulan bahwa Tiongkok telah memisahkan urusan agama dengan pemerintahan, dimana pemerintah Tiongkok tidak memaksakan warganya untuk beragama maupun tidak. Selain itu Tiongkok juga memiliki trauma atas kejadian terorisme dimasa lampau yang menjadikan Tiongkok mengeluarkan kebijakan-kebijakan ketat terkait terorisme dan separatisme. Menurut penuturan perwakilan delegasi dari MUI, Muhyiddin Junaidi, kebijakan Tiongkok sangat mudah disalah artikan sehingga sebagai umat Muslim harus berusaha mengutamakan kehati-hatian. Di Tiongkok ibadah atau agama adalah suatu urusan pribadi yang tidak boleh ditunjukkan di depan umum. Jika diperlihatkan di depan umum, maka hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan radikal. Hal tersebut berpotensi menjadikan seorang muslim mendapat sanksi karena dianggap radikal. MUI, NU serta Muhammadiyah kemudian memiliki pandangan yang sama bahwa perlu adanya keterlibatan dari *China Islamic Association* (CIA) dalam pemberian status radikal. Keterlibatan CIA diharapkan dapat membantu umat Islam di Tiongkok untuk dapat melaksanakan ibadah secara lebih leluasa (Ramadhani 2019). Meskipun Muhammadiyah menyatakan satu pemikiran dengan MUI dan NU, namun dalam pernyataannya, Muhammadiyah mengemukakan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ketika berkunjung ke Xinjiang (Rahayu 2019).

Gambar 2: Kunjuangan Muhammadiyah ke Xinjiang



Sumber: (Suara Muhammadiyah 2021)

2.3. Muhammadiyah Sebagai Organisasi Perdamaian Dunia

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal sebagai KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah). Organisasi Muhammadiyah termasuk dalam salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah warga Muhammadiyah mencapai 50 juta warga. Selain sebagai ormas Islam terbesar, Muhammadiyah juga menjadi salah satu nominasi untuk mendapatkan penghargaan nobel penghargaan. Nominasi tersebut diberikan dengan alasan organisasi Muhammadiyah telah aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Diketahui Muhammadiyah aktif memfasilitasi perdamaian atas konflik Mindanao, Filipina Selatan Filipina serta konflik Thailand Selatan (Auliani 2019). Pada konflik Thailand, Muhammadiyah Bersama ormas Islam Singapura dan Malaysia sepakat menggunakan *soft diplomasi* dengan mengedepankan cara dakwah, mendirikan lembaga pendidikan Islam serta memberdayakan perekonomian melalui keuangan mikro (Koran Tempo 2008).

Sedangkan di Filipina, Muhammadiyah menggunakan hak Muhammadiyah sebagai anggota resmi dari International Contact Group (ICG) untuk memediasi konflik di kawasan Mindanao terkait aksi separatistis kelompok Abu Sayyaf. Muhammadiyah bersama *Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations* (CDCC) juga diketahui memprakarsai berdirinya *World Peace Forum*, sebuah forum yang digunakan untuk menyiapkan gagasan untuk menjalankan perdamaian dunia yang dapat diikuti oleh aktivis-aktivis dari seluruh dunia (Auliani 2019). Sebagai organisasi yang berusaha menjaga perdamaian dunia, Muhammadiyah juga secara kritis mengkritik tindakan pemerintah Tiongkok kepada etnis Uighur di kawasan Xinjiang. Kritik tersebut disampaikan dalam beberapa pernyataan resmi yang diunggah oleh PP Muhammadiyah.

Pernyataan pertama yang diunggah pada tanggal 19 Desember 2018. Dalam pernyataan tersebut terdapat 7 poin yang menjelaskan sikap Muhammadiyah terkait isu kekerasan terhadap etnis Uighur. *Pertama*, PP Muhammadiyah menyatakan jika isu kekerasan tersebut benar adanya, maka menurut PP Muhammadiyah, tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Karena tindakan tersebut telah melanggar perikemanusiaan dan hak asasi manusia yang telah disahkan oleh PBB. Muhammadiyah menyarankan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan yang elegan dan berfokus pada kesejahteraan pelaku separatisme. *Kedua*, PP Muhammadiyah menghimbau kepada pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait keadaan etnis Uighur serta bekerjasama dengan berbagai lembaga resmi yang berwenang menangani permasalahan kemanusiaan untuk mengatasi konflik yang terjadi dan memperkecil opini publik. *Ketiga*, PP Muhammadiyah

mendesak PBB dan OKI sebagai lembaga yang berwenang mengatasi segala tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia untuk mengadakan pertemuan yang membahas konflik Uighur guna mengatasi konflik tersebut dan mengantisipasi konflik berjalan berkelanjutan. *Keempat*, PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menjalankan langkah diplomatik yang sesuai prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia. *Kelima*, PP Muhammadiyah meminta Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya pada masyarakat Indonesia melalui ormas Islam agar isu Uighur ini tidak mengganggu hubungan bilateral antar kedua negara. *Keenam*, Muhammadiyah siap membantu Tiongkok dalam menciptakan perdamaian di wilayah Xinjiang dengan menggalang dukungan kemanusiaan dan material. *Ketujuh*, PP Muhammadiyah menghimbau agar umat Islam di Indonesia menjunjung tinggi rasa solidaritas sesama Muslim termasuk solidaritas dengan Uighur untuk menciptakan kesatuan dan perdamaian (PP Muhammadiyah 2019).

Usai pernyataan tersebut, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia merespon saran PP Muhammadiyah dengan langsung mengunjungi kantor PP Muhammadiyah pada 28 Desember 2019. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Tiongkok untuk RI menegaskan bahwa pemberitaan media yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM etnis Uighur merupakan pemberitaan yang sesat. PP Muhammadiyah kemudian menyarankan Tiongkok untuk membuka akses pada masyarakat internasional untuk dapat mengunjungi Xinjiang. Hal tersebut direspon dengan baik oleh Dubes Tiongkok yang mengundang masyarakat Indonesia untuk dating berkunjung dan melihat-lihat kondisi di Xinjiang (CNN Indonesia 2018). Kunjungan Muhammadiyah beserta delegasi Indonesia lainnya pun dilakukan pada

bulan Februari 2019. Usai kunjungan tersebut seluruh delegasi Indonesia termasuk Muhammadiyah sepakat menyatakan konflik Uighur merupakan permasalahan domestik. Seluruh delegasi Indonesia hanya menyarankan pemerintah Tiongkok untuk mengikutsertakan ormas Islam di Tiongkok dalam pengadilan pemutusan tindakan-tindakan yang dianggap radikal agar keputusan tersebut tidak mempersempit ruang gerak Muslim di Tiongkok dalam melaksanakan ibadah (Ramadhani 2019). Pernyataan tersebut kemudian mengundang kritik dari media Amerika Serikat yakni the Wall Street Journal (WSJ). WSJ menulis laporan yang menyatakan delegasi Indonesia menerima sejumlah donasi dari Tiongkok agar tidak lagi memberitakan hal-hal negatif seputar isu Uighur di Xinjiang. Laporan tersebut tentunya dibantah oleh seluruh delegasi Indonesia. Melalui sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Muhammadiyah menyatakan tidak mendapatkan sepeserpun donasi dari pemerintah Tiongkok. Muhammadiyah juga memastikan bahwa tidak akan merubah sikapnya untuk terus menyampaikan pandangan Muhammadiyah sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir menambahkan bahwa isu Uighur sangat bersinggungan dengan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok serta erat kaitannya dan PBB dan lembaga internasional lainnya yang memiliki wewenang atas penegakan hak asasi manusia. Sedangkan Muhammadiyah hanya lembaga sosial-keagamaan sehingga tidak memiliki wewenang untuk mencampuri permasalahan negara lain. Namun meskipun demikian, Muhammadiyah akan terus memihak pihak yang terdzalimi dengan mengatas namakan kemanusiaan dan perdamaian dunia dengan cara memberikan masukan-masukan pada pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok (Suara Muhammadiyah 2019).

PP Muhammadiyah juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait permasalahan HAM di Uighur pada 16 November 2019. Pernyataan tersebut memuat tujuh pandangan dan sikap Muhammadiyah dalam menyikapi isu etnis Uighur setelah kunjungan Muhammadiyah ke Xinjiang. *Pertama*, Muhammadiyah menyayangkan pemberitaan oleh Wallstreet Journal terkait pemberian donasi dari Tiongkok kepada Muhammadiyah. PP Muhammadiyah menganggap hal tersebut sebagai fitnah dan meminta Wallstreet Journal untuk meralat pemberitaan dan meminta maaf pada warga Muhammadiyah. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka Muhammadiyah akan menempuh jalur hukum. *Kedua*, PP Muhammadiyah mendesak Tiongkok agar lebih membuka akses kepada masyarakat internasional terkait keadaan etnis Uighur serta meminta pemerintah Tiongkok menghentikan segala tindak persekusi dengan alasan apapun dan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan berdialog dengan tokoh Uighur. *Ketiga*, PP Muhammadiyah mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM pada etnis Uighur dan etnis lainnya. *Keempat*, PP Muhammadiyah juga mendesak OKI untuk mengadakan Sidang Khusus guna mengambil langkah dalam perlindungan hak asasi manusia umat Islam terutama etnis Uighur. *Kelima*, PP Muhammadiyah turut mendesak pemerintah Indonesia untuk menanggapi aspirasi umat Islam di Indonesia dan menggunakan keanggotaan OKI dan anggota tidak tetap DK PBB dalam menggalang diplomasi guna mengakhiri pelanggaran HAM etnis Uighur. *Keenam*, PP Muhammadiyah menghimbau masyarakat Indonesia untuk menyikapi persoalan dengan rasional sehingga tidak terpengaruh berita yang mengadu domba ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. *Ketujuh*, PP Muhammadiyah juga menghimbau warga Muhammadiyah untuk menggunakan media sosial dengan

bijak dan berpegang teguh dalam prinsip Muhammadiyah dalam menyelesaikan segala persoalan (PP Muhammadiyah 2019).

PP Muhammadiyah juga menceritakan pengalaman delegasi Indonesia selama melakukan kunjungan ke Xinjiang. Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah yakni Muhyidin Junaidi menceritakan bahwa dalam kunjungan tersebut diketahui bahwa peraturan di Tiongkok menegaskan bahwa agama merupakan suatu hal yang dianggap pribadi sehingga tidak boleh dilaksanakan di tempat umum. Masyarakat yang melaksanakan ibadah di tempat umum akan dianggap radikal, terlebih apabila peribadahan dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun, sehingga tempat ibadah di Tiongkok hanya berisikan orang tua saja. Masyarakat yang melakukan ibadah di tempat terbuka akan dibawa ke kamp-kamp pelatihan untuk mendapatkan pelatihan seputar konstitusi Tiongkok dan bahasa Tiongkok. Dalam kamp tersebut masyarakat dilarang melaksanakan ibadah termasuk sholat, berpuasa dan membaca al-Quran serta diharuskan memakan apapun yang disediakan oleh pemerintah Tiongkok. Selama berada di kamp tersebut, masyarakat akan terus diawasi dengan keberadaan CCTV disetiap pojok wilayah. Menurut keterangan perwakilan dari CIA, Muslim disana merapel sholatnya dalam delapan bulan atau satu bulan atau satu minggu. Selanjutnya Mahyuddin menceritakan kejanggalan yang ada di Xinjiang seperti ketika meminta untuk dibawa ke masjid untuk sholat, permintaan tersebut ditolak dengan alasan suhu -17 derajat. Sehingga rombongan delegasi Muhammadiyah hanya dapat melaksanakan ibadah sholat di hotel dengan petunjuk arah kiblat yang baru dipasang. Kejanggalan juga dialami seorang wartawan yang ingin membeli rokok namun kemudian di hadang oleh pihak Tiongkok. Delegasi Muhammadiyah juga

mengunjungi wilayah dimana etnis Uighur yang terpapar ISIS melakukan tindak kejahatan serta mengunjungi kamp pelatihan. Muhammad Ziyad selaku Ketua Lembaga Khusus PP Muhammadiyah menceritakan di kamp tersebut para pemuda desa ditangkap karena menanyakan ilmu Islam seputar halal dan haram serta tentang peribadahan. Delegasi Muhammadiyah kemudian memberikan usulan kepada pemerintah Tiongkok agar mengizinkan pelaksanaan sholat di kamp pelatihan minimal tiga kali sehari yakni shubuh, dzuhur-asar serta maghrib-isyah (Suara Muhammadiyah 2019).

BAB III

ANALISIS DAMPAK ISU UIGHUR TERHADAP SENTIMEN ANTI TIONGKOKDARI KALANGAN MUHAMMADIYAH

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur yang kemudian menjadi isu internasional. Isu tersebut kemudian banyak mendapat respon dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah mengeluarkan beberapa pernyataan yang berisi saran untuk penyelesaian konflik Uighur di Xinjiang. Isu etnis Uighur yang mengundang respon dari berbagai pihak ini kemudian menarik untuk diteliti menggunakan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme akan digunakan untuk menganalisis sebuah pemberitaan yang dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap aktor lain di negara lain. Dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis isu etnis Uighur yang mempengaruhi sikap dan pemikiran kalangan Muhammadiyah di Indonesia.

3.1. Dampak Isu Uighur Menurut Konstruktivisme

Isu Uighur yang menjadi perbincangan masyarakat internasional merupakan suatu dugaan pelanggaran norma hak asasi manusia. Isu tersebut kemudian disiarkan oleh berbagai media internasional sehingga mengundang perhatian berbagai pihak. Pemberitaan tersebut menyudutkan pemerintah Tiongkok dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur, dimana sebagian besar pemberitaan tersebut menyiarkan berita berupa cerita dari pihak etnis Uighur sebagai korban.

Isu tersebut kemudian mengundang respon berupa demonstrasi, boikot bahkan kebijakan luar negeri baru terhadap Tiongkok. Sebagai contoh, demonstrasi dilakukan oleh masyarakat Hongkok pada 22 Desember 2019. Ditengah-tengah protes masyarakat Hongkong yang menolak RUU Ekstradisi ke Tiongkok, sekitar 1000 masyarakat Hongkong juga menggelar demonstrasi untuk membela kebebasan hak asasi manusia etnis Uighur. Para demonstran mengibarkan bendera Uighur dan menyerukan “bebaskan Uighur, bebaskan Hongkong” sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap nasib etnis Uighur di Tiongkok (Sebayang 2019). Selain demonstrasi, masyarakat Malaysia juga menyuarakan boikot produk Tiongkok secara serentak. Ulama Malaysia, Muhammad Asri bin Zainul Abidin dalam pertemuan negara-negara Muslim di Kuala Lumpur, Malaysia menyatakan negara Muslim harus serentak memboikot produk-produk Tiongkok dengan tujuan untuk mengganggu perekonomian Tiongkok sebagai bentuk protes negara Muslim atas persekusi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur (Suryanrandika 2019). Bahkan Amerika Serikat merancang RUU Uighur, dimana RUU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Tiongkok ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan kepada etnis Uighur di wilayah otonom Provinsi Xinjiang termasuk sanksi kepada pejabat-pejabat Tiongkok yang turut serta menahan satu juta etnis Uighur di kamp-kamp pelatihan. Tujuan RUU tersebut adalah untuk mengatasi pelanggaran HAM dalam skala besar termasuk penahanan 1 juta etnis Uighur oleh pemerintah Tiongkok (BBC News 2019).

Berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat internasional sebagai kecaman atas isu Uighur merupakan sebuah konstruksi sosial. Pemerintah Tiongkok yang dikabarkan melakukan pelanggaran norma hak asasi manusia terhadap etnis Uighur bersebrangan dengan identitas dan kepentingan aktor-aktor di negara lain sebagai aktor moderen yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara norma HAM tersebut. Kemudian seruan dari satu negara yang mengecam tindakan Tiongkok menjadi perbincangan di media internasional mengundang sepemahaman aktor lain di negara lain untuk turut serta mengecam tindakan pemerintah Tiongkok, meskipun kasus tersebut masih dalam status dugaan. Tidak hanya mengecam, beberapa negara juga mengeluarkan kebijakan luar negeri baru yang dapat mengubah struktur politik internasional seperti memboikot produk Tiongkok dan RUU Uighur yang menghukum pejabat-pejabat Tiongkok.

3.2. Sentimen Anti Tiongkok dari Kalangan Muhammadiyah

Sentimen anti Tiongkok di Indonesia termasuk dari kalangan Muhammadiyah telah ada sejak beberapa dekade terakhir. Sentimen tersebut terus bermunculan dengan bentuk baru sebagai respon dari berbagai isu Tiongkok yang ada di Indonesia. Begitu pula saat munculnya isu etnis Uighur, beberapa kalangan Muhammadiyah di Indonesia pun menunjukkan adanya sentimen anti Tiongkok. Salah satu bentuk sentimen dari kalangan Muhammadiyah adalah demonstrasi yang dilakukan oleh IMM Sukabumi dengan tuntutan mendesak pemerintah daerah Kota Sukabumi agar mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan kepada pemerintah Tiongkok untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi kepada etnis

Uighur, membuka akses bantuan internasional kepada etnis Uighur, mengambil langkah diplomasi dengan pemerintah Tiongkok untuk menghentikan kekerasan dan persekusi kepada etnis Uighur serta membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada media internasional terkait pelanggaran HAM etnis Uighur (PC IMM Sukabumi Jaya 2018).

Sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah menurut Deni Al-Asyari juga disampaikan pada dialog-dialog di media sosial, dimana masyarakat awam di Muhammadiyah melihat isu Uighur sebagai isu kekerasan kepada masyarakat Muslim. Sentimen tersebut mayoritas disampaikan oleh masyarakat awam atau level bawah, dikarenakan munculnya isu ini dikemas dalam isu keagamaan sehingga sangat sensitif, ditambah lagi pada periode masa 2018-2019 banyak berkembang permasalahan eksodus lain yang semakin memicu munculnya sentimen anti Tiongkok. Bentuk lain dari sentimen anti Tiongkok sebagai dampak adanya isu etnis Uighur menurut Deni Al-Asyari adalah munculnya kritik-kritik terhadap kerja sama Muhammadiyah dengan Tiongkok. Seperti yang diketahui bahwa kerja sama Muhammadiyah dengan Tiongkok lebih berfokus pada bidang Pendidikan dan kebudayaan. Setelah adanya isu etnis Uighur ini, terdapat beberapa universitas Muhammadiyah di Indonesia yang mulai berkurang ketertarikannya untuk menjalin kerja sama pertukaran mahasiswa dengan universitas Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya kapasitas mahasiswa *exchange* dalam program pertukaran mahasiswa ini. Namun meskipun kapasitas dalam program tersebut berkurang, tidak lantas menyebabkan berakhirnya kerjasama tersebut (Al-Asyari 2021).

Sedangkan menurut Agung Danarto, senimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah sudah berkembang dari beberapa puluh tahun lalu dan selalu mengalami pasang surut. Terutama pada hari-hari menjelang peringatan G30S PKI serta ketika muncul berbagai isu tentang Tiongkok baik terkait dominasi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia maupun isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Dengan latar belakang masyarakat Muhammadiyah yang sangat heterogen, membuat masyarakat Muhammadiyah memiliki keberagaman argumen, pendapat serta pemikiran. Misalnya sebagian masyarakat Muhammadiyah memiliki faham yang sangat anti Tiongkok, namun sebagian lagi sangat anti Barat. Hal tersebutlah yang berpotensi menjadikan masyarakat Muhammadiyah terlibat dalam konflik Tiongkok dengan Barat. Sehingga Agung Danarto menyarankan masyarakat Muhammadiyah untuk bersikap realistis, terlebih di masa depan, dunia tidak hanya di dominasi oleh negara-negara Barat namun juga dapat di dominasi oleh Tiongkok, karena pertumbuhan dominasi Tiongkok yang berkembang pesat (Danarto 2021).

Sentimen anti Tiongkok pada kurun waktu 2018-2019 sendiri menurut Agung Danarto terbagi menjadi dua. *Pertama*, sentimen anti Tiongkok karena adanya dugaan pelanggaran HAM dari pemerintah Tiongkok pada etnis Uighur. Isu tersebut tersebar di Indonesia dengan sangat cepat terlebih didukung dengan adanya jaringan media sosial yang saling membagikan informasi terkait Uighur ini. Akan tetapi informasi yang dibagikan di media sosial ini tidak dapat diverifikasi sehingga masyarakat tidak dapat memilah antara informasi hoax dan informasi faktual. *Kedua*, sentimen anti Tiongkok karena adanya dominasi peran ekonomi di Indonesia oleh para konglomerat Tiongkok. Isu ini lebih memanas dengan adanya pemilihan umum Presiden 2019 dengan dugaan adanya dukungan 9 naga yakni

kelompok konglomerat dari etnis Tionghoa yang mendukung salah satu kandidat Presiden (Danarto 2021).

Berbagai sikap sentimen anti Tiongkok yang ditunjukkan oleh masyarakat Muhammadiyah kemudian disertai kritik terhadap kerja sama antara Muhammadiyah dengan Tiongkok. Namun menurut Agung Danarto, satu atau dua kritikan terhadap kerja sama antara Muhammadiyah dengan Tiongkok merupakan hal yang wajar. Sehingga kritikan tersebut tidak mengganggu proses kerja sama yang telah berjalan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Tiongkok maupun antara Universitas Muhammadiyah dengan Universitas Tiongkok. Bahkan beberapa dosen Universitas Muhammadiyah juga diketahui sedang menjalankan Pendidikan lanjut S3 di Tiongkok. Kerja sama tersebut dapat menambah perspektif bahwa terdapat banyak mahasiswa Muhammadiyah yang belajar di luar negeri (Danarto 2021). Selain itu terdapat pula kritikan kepada pemerintah Indonesia terkait hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Kritikan tersebut meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM yang didominasi oleh masyarakat pribumi bukan kelompok konglomerat tertentu. Kemudian menyarankan pemerintah Indonesia untuk lebih membuka akses investasi tidak hanya dari Tiongkok namun juga dari negara-negara di kawasan lain terutama Timur Tengah. Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Tiongkok agar menyelesaikan konflik Uighur tanpa menggunakan kekerasan (Ibid).

Dari pandangan Ganis Khorunnisa' sebagai perwakilan PW IPM, isu-isu PKI beberapa tahun lalu, kemudian adanya isu kontestasi perpolitikan Indonesia serta paham-paham komunis di Indonesia menjadikan masyarakat Muhammadiyah

menjadi was-was atau khawatir berlebihan terhadap Tiongkok. Isu-isu tersebut kemudian memupuk adanya sikap sentimen anti Tiongkok terlebih dengan adanya isu Uighur ini. Bentuk sentimen anti Tiongkok ini pun cukup bervariasi, menurut Ganis, bentuk sentimen pada masyarakat di generasi *boomer* atau *baby boomer* dilakukan dengan penyebaran berita di grup whatsapp tanpa adanya validasi apakah pemberitaan tersebut benar atau salah. Selain itu pada generasi ini, sentimen anti Tiongkok akan lebih kuat, dalam artian mereka tidak peduli apapun yang dilakukan Tiongkok, mereka tetap akan tidak suka atau membenci Tiongkok. Sedangkan pada generasi Z atau milenial, sikap sentimen anti Tiongkok lebih slow. Dimana generasi ini akan lebih memvalidasi kebenaran dari berita yang diterima, kemudian memilah mana pemberitaan yang perlu mendapat feedback atau pendapat. Jika pemberitaan tersebut adalah seputar kesalahan Tiongkok, terlebih pelanggaran HAM makan isu tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian dari masyarakat (Khoirunnisa' 2021).

Dari berbagai sentimen anti Tiongkok tersebut, para aktivis Muhammadiyah juga memberikan kritik terhadap organisasi Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia. Kritik pada organisasi Muhammadiyah menurut Ganis, dilontarkan oleh masyarakat Muhammadiyah awam atau masyarakat Muhammadiyah yang bukan termasuk pada kalangan Dahlan asli. Heterogenya masyarakat Muhammadiyah menjadikan masyarakat Muhammadiyah terbagi menjadi beberapa kalangan antara lain MuSa atau Muhammadiyah Salaf, MuNU atau Muhammadiyah NU serta masyarakat Muhammadiyah asli yang kerap disebut dengan istilah Muhammadiyah Dahlan. Kritikan tersebut dikarenakan tidak tertanamnya pemikiran dan sikap wasathiyah sesuai dengan prinsip Muhammadiyah pada kalangan masyarakat

Muhammadiyah selain Muhammadiyah Dahlan. Mayoritas Muhammadiyah Dahlan memiliki pemahaman bahwa organisasi Muhammadiyah memiliki tujuan untuk mencerahkan, dimana salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan tetap mempertahankan hubungan baik dalam aspek pendidikan dan aspek sosial dengan pemerintah Tiongkok (Khoirunnisa' 2021). Berbeda dengan kritik yang ditujukan pada Muhammadiyah, kritik terhadap pemerintah Indonesia dirasa lebih keras digambarkan oleh masyarakat Muhammadiyah. Kritikan tersebut bahkan lebih kencang dibandingkan dengan kritikan dari masyarakat Muhammadiyah yang merasa kecewa dengan terjalannya hubungan kerjasama antara Muhammadiyah dengan Tiongkok. Kritik terhadap hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok semakin keras ketika pada 2019 dilaksanakan pemilihan umum presiden. Beberapa masyarakat yang tidak menyukai Jokowi mengangaop Jokowi pro Tiongkok karena keamatan hubungan antara Jokowi dengan pemerintah Tiongkok (Ibid).

Dari berbagai pandangan sentimen anti Tiongkok oleh kalangan Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah telah tumbuh dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2018-2019 muncul variasi dari sentimen anti Tiongkok karena adanya isu pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok berupa pelanggaran HAM kepada etnis Uighur mempengaruhi kalangan Muhammadiyah sesuai dengan konsep *internationalization* yang dikemukakan oleh Michael Barnett. Pengaruh tersebut kemudian memunculkan pemikiran kebencian atau sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah sesuai konsep idealisme konstruktivis. Sentimen anti

Tiongkok tersebut memunculkan berbagai sikap, mulai dari demonstrasi dari aktivis Muhammadiyah, perdebatan di media sosial serta penyuaran isu etnis Uighur di media sosial. Sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah ini mayoritas muncul pada masyarakat Muhammadiyah yang tidak terlalu paham akan tujuan dan prinsip Muhammadiyah sehingga memiliki pemikiran yang berbeda dengan pimpinan atau organisasi Muhammadiyah. Sehingga muncul kritikan dari kalangan tersebut terkait hubungan kerjasama antara Muhammadiyah dengan Tiongkok dan juga pemerintah Indonesia dengan Tiongkok.

Setelah adanya isu etnis Uighur ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok yakni identitas Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang harus memperdulikan sesama Muslim yang mendapat kemungkaran termasuk etnis Uighur, kritikan dari kalangan Muhammadiyah yang memiliki sentimen anti Tiongkok serta kepentingan Muhammadiyah dalam mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa Muhammadiyah dan legitimasi bahwa mahasiswa Muhammadiyah mendapatkan akses untuk belajar di berbagai tempat di luar negeri. Dari faktor pertimbangan tersebut, sebagai aktor yang memiliki otonomi secara utuh sesuai konsep strukturalisme, Muhammadiyah memilih untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok dalam bidang pendidikan dan sosial sembari melakukan beberapa upaya untuk menghentikan kekerasan di Xinjiang.

3.3. Sikap Muhammadiyah sebagai Konstruksi Sosial dari Isu Uighur

Isu Uighur yang mendapatkan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok sebagai aktor dominan ramai diperbincangkan pada tahun 2018 oleh masyarakat Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah. Berbagai media internasional menampilkan berita-berita terkait kekerasan dan diskriminasi yang diderita oleh etnis Uighur. Berita tersebut menduga ada diskriminasi agama seperti larangan sholat, berpuasa, memelihara jenggot, menggunakan jilbab, sulitnya akses mendapatkan makanan halal dan juga dugaan kekerasan dengan ditahannya sekitar satu juta etnis Uighur di kamp-kamp pelatihan yang disediakan pemerintah Tiongkok serta berbagai dugaan pelanggaran HAM lainnya. Dalam menyikapi isu etnis Uighur tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia sekaligus organisasi perdamaian mengeluarkan pernyataan pada akhir 2018. Pernyataan tersebut berisi 7 poin yang berkesimpulan jika segala pemberitaan terkait persekusi terhadap etnis Uighur benar adanya, maka Muhammadiyah mengecam tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok, kemudian Muhammadiyah meminta pemerintah Tiongkok membuka akses secara terbuka agar masyarakat internasional dapat mengamati keadaan Uighur secara real. Muhammadiyah juga mendesak berbagai lembaga berwenang seperti PBB, OKI serta pemerintah Indonesia agar segera menindak lanjut isu Uighur (PP Muhammadiyah 2018). Selanjutnya setelah diajukan saran terkait pembukaan akses menuju Xinjiang, beberapa delegasi Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Xinjiang pada Februari 2019. Pada kunjungan ke Xinjiang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah Tiongkok sangat terbuka perihal keagamaan namun terdapat kesulitan etnis Uighur dalam kamp

pelatihan untuk melaksanakan sholat karena dugaan radikalisme. Pada saat di Xinjiang, delegasi Muhammadiyah sempat mengusulkan perizinan sholat dalam 3 waktu di kamp pelatihan terhadap pemerintah Tiongkok tetapi tidak mendapat sambutan yang baik. Selepas itu, delegasi Muhammadiyah mengusulkan agar diikuti sertakannya CIA dalam penentuan tingkat radikalisme di Tiongkok (Suara Muhammadiyah 2019). Seusainya kunjungan ke Xinjiang, seluruh delegasi dari Indonesia kemudian menyatakan bahwa permasalahan Uighur di Xinjiang merupakan isu domestik yang sebaiknya segera diselesaikan oleh Tiongkok tanpa adanya kekerasan. Pernyataan tersebut mengundang dugaan dari WSJ yang menuduh adanya sokongan dana dari Tiongkok terhadap Muhammadiyah agar Muhammadiyah tidak lagi menyuarakan hak-hak etnis Uighur. Atas dugaan tersebut Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan kembali pada Desember 2019 yang berisi sanggahan Muhammadiyah kepada tuduhan WSJ dan meminta WSJ meminta maaf atas tuduhannya. Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Tiongkok untuk lebih membuka akses menuju Xinjiang dan keadaan etnis Uighur dan menghentikan seluruh pelanggaran HAM atas dasar apapun (PP Muhammadiyah 2019).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Media Suara Muhammadiyah, Bapak Deni Al-Asyari. Diketahui bahwa Suara Muhammadiyah merupakan sebuah media yang strukturnya langsung berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga Suara Muhammadiyah menjadi media resmi yang mengeluarkan pernyataan atau suara resmi dari PP Muhammadiyah, termasuk pernyataan Muhammadiyah terkait Uighur. Dari keterangan Deni Al-Asyari, pada awalnya Muhammadiyah cukup keras dalam menanggapi isu etnis

Uighur. Kemudian upaya pertama yang ditempuh Muhammadiyah adalah dengan beraudiensi dengan kementerian Tiongkok yang mengurus urusan agama. Dari audiensi tersebut, perwakilan pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa segala pemberitaan yang ada dipermukaan atau diunggah media-media asing merupakan berita yang tidak benar atau hoax dan menyatakan bahwa isu tersebut merupakan isu yang dibuat oleh media barat karena adanya perebutan kawasan Asia dalam aspek ekonomi. Selanjutnya PP Muhammadiyah meminta pemerintah Tiongkok untuk membuka akses terhadap dunia internasional, termasuk keterbukaan informasi dan keterbukaan wilayah agar tidak ada kesalah pahaman di kalangan masyarakat internasional. Setelah saran tersebut, beberapa delegasi Muhammadiyah mengunjungi Tiongkok. Bapak Deni Al-Asyari berkesempatan mengikuti salah satu kunjungan tersebut. Menurut Pak Deni, keadaan muslim di pusat Tiongkok atau di Beijing dapat dikatakan sangat terbuka. Delegasi Muhammadiyah mengunjungi beberapa komunitas Muslim di Tiongkok dan mendapat keterangan bahwa segala aktivitas keagamaan di Beijing mendapat pembiayaan secara menyeluruh oleh pemerintah Tiongkok, termasuk lahan untuk Masjid atau pondok pesantren. Pemerintah Tiongkok juga memberikan gaji kepada para guru agama di Tiongkok dan fasilitas sekolah gratis bagi santri Muslim di Beijing. Bahkan menurut keterangan beliau, aktifitas keagamaan di Masjid Beijing juga sangat terbuka dimana adzan dikumandangkan dengan bebas serta sholawat dan pembacaan Al-Quran pun disiarkan di Masjid Beijing dengan bebas. Namun Muhammadiyah merasa informasi tersebut belum cukup karena belum adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Tiongkok terkait wilayah Xinjiang serta lebih spesifik pada keadaan etnis Uighur (Al-Asyari 2021).

Deni Al-Asyari kemudian mendapatkan informasi lain terkait konflik etnis Uighur. Dimana Deni Al-Asyari menganalogikan etnis Uighur seperti pribumi yang tergusur oleh kebijakan rezim Tiongkok sehingga mereka melakukan upaya pemberontakan, isu ini kemudian diartikan memiliki kesamaan dengan konflik Aceh atau Papua di Indoensia. Kebijakan-kebijakan rezim tersebut lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan politik, dimana aktifitas ekonomi etnis Uighur dapat dikatakan tidak ada pergerakan dan tidak menguntungkan masyarakat. Deni Al-Asyari kemudian menduga bahwa konflik etnis Uighur dengan pemerintah Tiongkok tidak hanya seputar isu keagamaan, namun lebih pada isu ekonomi politik. Kemudian isu keagamaan diduga dikapitalisasi sehingga menjadi ideologi yang bersebrangan dengan pemerintah sebagai cara etnis Uighur melawan kekuasaan rezim Tiongkok.

Ruang kebebasan beragama antara Beijing dan Xinjiang kemudian sangat terasa. Deni Al-Asyari menyimpulkan konflik etnis Uighur di Xinjiang yang menyebabkan tidak adanya kebebasan keberagamaan disana disebabkan adanya kapitalisasi isu agama pada aspek ekonomi dan politik. Dengan kata lain, jika pelaku-pelaku keagamaan atau orang Muslim Uighur sudah masuk pada aspek ekonomi dan politik Xinjiang, hal tersebut dapat diartikan sebagai tindakan ekstrimisme dan radikal.

Oleh karena itu, menurut Deni Al-Asyari, sikap Muhammadiyah dalam konflik Uighur ini antara lain minta konflik Uighur diselesaikan oleh Tiongkok secara independen, meminta keterbukaan akses informasi agar tidak ada kesalah pahaman antara masyarakat global dan juga warga Muhammadiyah terkait kondisi etnis Uighur karena menurut beliau hingga kini akses ke Uighur sangat susah

didapatkan, bahkan lebih susah dalam menembus akses ke Palestina. Terakhir, Muhammadiyah mengecam jika benar adanya tindakan pelanggaran HAM. Sedangkan terkait peran Muhammadiyah yang keras di awal dan menurunnya intensitas opini Muhammadiyah di akhir dan berbedanya tindakan Muhammadiyah kepada konflik Uighur dan Filipina disebabkan karena kurangnya akses informasi kejadian di lapangan sehingga Muhammadiyah tidak dapat melakukan kajian lebih terhadap kasus ini. Terlebih kasus ini tidak hanya seputar agama dan etnis seperti konflik Filipina, sehingga Muhammadiyah belum dapat memediasi kedua belah pihak. Namun dapat ditegaskan bahwa Muhammadiyah tetap keras dan tetap protes terhadap tindakan Tiongkok kepada etnis Uighur. Muhammadiyah juga tetap berusaha memberikan bantuan kepada etnis Uighur dengan memberikan bantuan dana dan pendidikan, meskipun lagi-lagi banyian tersebut sulit disalurkan karena minimnya akses menuju etnis Uighur di Xinjiang (Al-Asyari 2021).

Selanjutnya dari wawancara dengan Agung Danarto, Sekertaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, isu etnis Uighur dapat dipandang melalui dua jendela yang berbeda yakni permasalahan kemanusiaan yakni dugaan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia etnis Uighur dan permasalahan politik yakni isu perebutan dominasi politik antara Tiongkok dengan negara Barat atau Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian dalam isu kemanusiaan, Muhammadiyah telah mengambil sikap dengan meminta akses kunjungan ke Tiongkok terutama ke Xinjiang. Permintaan tersebut pun direspon dengan baik oleh pemerintah Tiongkok meskipun akses yang diberikan tidak sepenuhnya terbuka, terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dilihat oleh Muhammadiyah. Kemudian delegasi

Muhammadiyah melakukan beberapa kunjungan ke Tiongkok dan berdialog dengan beberapa komunitas Muslim di sana termasuk komunitas Muslim di Xinjiang. Dari kunjungan tersebut, Muhammadiyah mendapatkan pemahaman bahwa Tiongkok memiliki prinsip keberagamaan yang berbeda dengan negara lain, dimana hak beragama hanya dimiliki oleh orang yang sudah dewasa, sedangkan untuk anak-anak, hak tersebut belum dapat diberikan. Dengan kata lain, anak-anak di Tiongkok tidak dapat melaksanakan ibadah di tempat umum. Menurut Agung Danarto, perspektif tersebut sudah menjadi perspektif umum di Muslim Tiongkok (Danarto 2021). Dalam aspek tersebut, Muhammadiyah tidak dapat mencampuri urusan atau kebijakan domestik Tiongkok yang sudah dipahami oleh masyarakat di sana. Sedangkan untuk isu kekerasan seperti paksaan memakan makanan haram, Muhammadiyah mengambil sikap tegas dengan menentang tindakan Tiongkok dengan memberikan himbauan kepada pemerintah Tiongkok agar dapat berlaku adil dengan masyarakat Uighur serta memberikan hak asasi manusia kepada etnis Uighur dengan tidak melakukan kekerasan. Namun menurut Agung Danarto, Muhammadiyah belum dapat memberikan bantuan secara real kepada masyarakat Uighur karena tidak adanya akses maupun izin dari pemerintah Tiongkok. Agung Danarto kemudian menyamakan kasus ini dengan kasus yang ada di Myanmar, dimana Muhammadiyah ingin memberikan bantuan kepada Rohingya namun juga tidak mendapat izin dari pemerintah setempat sehingga bantuan sulit diberikan (Ibid).

Sedangkan dalam permasalahan politik, Muhammadiyah perlu berhati-hati dalam menanggapi isu ini. Menurut Agung Danarto, terkait isu Uighur, terdapat perspektif yang bertentangan antara negara Barat dengan Tiongkok. Dimana

permasalahan yang memiliki pemberitaan diametral menjadikan permasalahan tersebut menjadi isu yang informasinya tidak dapat dipercayai sepenuhnya, karena informasi yang diberikan oleh dua pihak yang bertentangan akan selalu memiliki aspek kebenaran dan kesalahan di masing-masing pihak. Sehingga Muhammadiyah perlu melihat isu tersebut sebagai isu domestik dan Muhammadiyah tidak berkeinginan untuk ikut campur terlalu dalam pada konflik Tiongkok dan Barat (Danarto 2021).

Dari pandangan masyarakat Muhammadiyah atau pelajar Muhammadiyah, Ganis Khoirunnisa' selaku Sekertaris Bidang Perkaderan Pimpinan Wilayah IPM Jawa Tengah menyatakan bahwa dalam isu etnis Uighur, PW IPM Jateng mencoba untuk menyuarakan isu ini dengan melakukan kampanye di media sosial. Kampanye tersebut dimuat dalam pamflet dan infografis seputar genologi kekerasan yang terjadi pada etnis Uighur. Bahkan beberapa aktivis IPM di luar Jawa Tengah diketahui melakukan semacam aksi drama kolosal di tengah kota yang menceritakan kekerasan yang dirasakan etnis Uighur. Selain dalam organisasi, aktivis IPM juga sering kali berdialog di media sosial terutama twitter yang membahas persekusi tersebut. Dalam dialog tersebut diketahui terdapat pro dan kontra, terlebih isu ini tidak hanya isu agama namun juga ekonomi dan politik (Khoirunnisa' 2021). Kemudian menurut Ganis Khoirunnisa', posisi Muhammadiyah dalam konflik ini menjadi serba salah dalam mencoba memediasi Uighur dengan Tiongkok maupun dengan masyarakat internasional. Posisi tersebut menjadi mudah untuk di hitam dan putihkan. Namun hal tersebut sudah menjadi resiko dari sikap wasathiyah yang Muhammadiyah terapkan (Ibid).

Dalam respon yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah, terdapat hasil dari konstruksi sosial yakni tanggapan Muhammadiyah sebagai komunitas yang memiliki identitas Muslim dan mencoba menjaga perdamaian dunia. Identitas tersebut memicu Muhammadiyah untuk menyikapi dengan tegas tindakan pemerintah Tiongkok yang diduga melanggar hak asasi manusia Muslim Uighur yang memiliki identitas yang sama dengan Muhammadiyah. Tindakan tersebut diwujudkan dalam sebuah pernyataan yang mendesak pemerintah Tiongkok untuk menghentikan tindak kekerasan serta kebijakan luar negeri dengan meminta Tiongkok untuk memberikan akses kunjungan ke Xinjiang. Hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah sesuai dengan konsep *institutionalization of norms* oleh Michael Barnett, yakni dengan menjalankan peran Muhammadiyah sebagai aktivis norma untuk membujuk atau menyarankan aktor agar tetap menjaga dan tidak melanggar norma hak asasi manusia yang sudah ada.

BAB IV

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Isu etnis Uighur yang diduga mendapat pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok mendapat banyak perhatian dari masyarakat internasional termasuk kalangan Muhammadiyah di Indonesia. Rasa solidaritas sesama Muslim dari kalangan Muhammadiyah dengan etnis Uighur memunculkan sentimen anti Tiongkok pada tahun 2018-2019. Untuk menjelaskan munculnya sentimen tersebut, penulis menggunakan teori konstruktivisme berdasarkan pendapat Michael Barnett. Tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan melakukan kekerasan dan melanggar norma hak asasi manusia etnis Uighur mempengaruhi pemikiran dari kalangan Muhammadiyah sehingga beberapa kalangan Muhammadiyah membenci Tiongkok, hal ini sesuai dengan pendapat Barnett terkait idealisme atau pemikiran konstruktivisme, *internationalization* dan *institutionalization of norms*.

Kemudian munculnya sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah menjadikan beberapa kalangan Muhammadiyah memberikan kritik terhadap kerjasama antara Muhammadiyah dan Tiongkok serta dengan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi Muslim dan kepentingan Muhammadiyah untuk menjalin program pertukaran pelajar serta beasiswa bagi mahasiswa Muhammadiyah agar terdapat legitimasi bahwa banyak mahasiswa Muhammadiyah belajar di luar negeri, menjadikan Muhammadiyah tidak

mengubah struktur politik internasional yang ada antara Muhammadiyah dengan Tiongkok. Hal ini sesuai dengan pendapat Barnett bahwa identitas, kepentingan dan konstruksi sosial dapat menjadi pertimbangan suatu aktor dalam mengatur struktur politik internasional.

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada dampak isu etnis Uighur dari kalangan Muhammadiyah di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2019. Dimana pada penelitian ini mendapatkan sentimen anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah sudah ada sejak lama dan menjadi isu yang naik turun. Munculnya isu etnis Uighur menjadikan variasi baru dari sentimen anti Tiongkok yang sudah ada selama ini. Namun meskipun muncul sentimen anti Tiongkok di kalangan Muhammadiyah, tidak membuat Muhammadiyah menghentikan hubungan kerja sama antara Muhammadiyah dan Tiongkok karena adanya kepentingan dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyadari pada penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian yang menjadikan penelitian ini hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait respon Muhammadiyah dalam isu etnis Uighur. Sebagai kelanjutan dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian dampak isu etnis Uighur terhadap sentimen anti Tiongkok dari kalangan Nahdlatul Ulama, sebagai pembanding antara dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasulov, Abduljalil. 2019. *BBC News Indonesia*. 14 Februari. Accessed November 2021, 05. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47216216>.
- Al-Asyari, Deni, interview by Armiana Dyfa Ramithamanda. 2021. *Tanggapan Suara Muhammadiyah Terkait Posisi Muhammadiyah Dalam Konflik Uighur* Yogyakarta, (25 November).
- Andika, M. Tri, and Elcy Damayani. 2020. "Sikap Lunak OKI dalam Pelanggaran HAM Kelompok Muslim Uighur." *Analisis CSIS* 49 (01).
- Auliani, Palupi Annisa. 2019. *Nobel Perdamaian untuk Diplomasi Perdamaian NU-Muhammadiyah, Mungkinkah?* 30 April. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/20303851/nobel-perdamaian-untuk-diplomasi-perdamaian-nu-muhammadiyah-mungkinkah?page=all>.
- Barnett, Michael. 2008. "Social Constructivism." In *THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS: AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS 4e*, by John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens. New York: Oxford University Press.
- Barnett, Michael. n.d. "Sosial Constructivism." In *in The Globalisation of World Politics An Introduction to International Relation 4e*, by John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens.
- Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. 2008. *THE GLOBALIZATION OF WORLD POLITICS: AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS 4e*. New York: Oxford University Press.
- BBC News. 2019. *China dibuat murka oleh langkah AS mengesahkan RUU Uighur: "RUU langgar hukum internasional, jahat dan memfitnah"*. 4 Desember. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50654205>.
- BBC NEWS Indonesia. 2018. *BBC News Indonesia*. 12 Oktober. Accessed November 2021, 05. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45835871>.
- BBC News Indonesia. 2018. *Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur*. 24 Desember. Accessed November 23, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641>.
- Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Bahruddin. 2019. "SISTEM HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA [HAM] BERAT MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL." *SIGn Jurnal Hukum* 01 (01): 1-2.
- CNN Indonesia. 2019. *CNN Indonesia*. 19 November. Accessed November 19, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191118201642-113-449481/daftar-dugaan-penindasan-dan-dosa-china-terhadap-uighur>.
- . 2018. *Dubes China Sebut Pemberitaan Soal Uighur Sesat*. 28 Desember 2018. Accessed November 08, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181228163043-106-357082/dubes-china-sebut-pemberitaan-soal-uighur-sesat>.
- . 2019. *Puluhan Anggota PBB Kencam Sikap Represif China ke Uighur*. 26 September. Accessed November 06, 2021.

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190926085254-134-434140/puluhan-anggota-pbb-kecam-sikap-represif-china-ke-uighur>.
- Danarto, Agung, interview by Armiana Dyfa Ramithamanda. 2021. *Pendapat PP Muhammadiyah terkait Sentimen Anti Tiongkok dari Kalangan Muhammadiyah* (Desember 30).
- Dewi, Nanda Sagita, and Devica Rully Masrur. 2020. "KEJAHARAN KEMANUSIAAN (CRIMES AGAINST HUMANITY) DI NEGARA REPUBLIK TIONGKOK (RRT) TERHADAP MUSLIM UIGHUR." *JCA of LAW* 01 (02): 202-204.
- Dunne, Tim, Mirlja Kurki, and Steve Smith. 2013. *International Relations Theories Discipline and Diversity Third Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadillah, Dani, and Uspal Jandevi. 2020. "Media-Social Behavior of Muhammadiyah Members in China in the Framework of Alexander Wendt's International Communication Constructivism." *Journal of Social Studies* 16 (01): 51-64.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, Muhammad Nizar. 2003. "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina." *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional* 01 (03): 165.
- Indainanto, Yofiendi Indah. 2020. "Relasi Politik, Bullying dan Etika Mengenai Isu "Muslim Uighur" di Media Sosial." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 04 (01): 68-85.
- IPAC. 2019. *Explaining Indonesia's Silence on The Uyghur Issue*. Institute for Policy Analysis of Conflict.
http://file.understandingconflict.org/file/2019/06/Report_57_Uyghurs.pdf.
- IPAC. 2019. *Explaining Indonesia's Silence on The Uyghur Issue*. Institute for Policy Analysis of Conflict.
http://file.understandingconflict.org/file/2019/06/Report_57_Uyghurs.pdf.
- Jamali, Muhammad Zacky. 2020. "AMNESTY INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM MEMANDANG KONFLIK ETNIS MUSLIM UIGHUR DI CHINA." *Jurnal PIR* 05 (01): 87-93.
- Karisma, Gita. 2017. "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China terhadap Keutuhan Wilayah." *Jurnal Sosiologi* 19 (01): 46-47.
- KBBI. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/isu>.
- . n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/sentimen>.
- Khoirunnisa', Ganis, interview by Armiana Dyfa Ramithamanda. 2021. *Pandangan PW IPM Jateng terkait Isu Uighur* (26 November).
- Koran Tempo. 2008. *Konflik Thailand Diselesaikan Secara Damai*. 22 September.
<https://koran.tempo.co/amp/nasional/143111/konflik-thailand-diselesaikan-secara-damai>.
- Mahkamah Pidana Internasional. 1998. "Statuta Roma." *ELSAM* 4-5.

- Meancilla, Francisca. 2020. "KEBIJAKAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP KONFLIK UYGHUR DAN HAN: STUDI KASUS KONFLIK XINJIANG DI TIONGKOK." *Journal of International Relations* 06 (02): 368-374.
- Muhammadiyah. n.d. *Sejarah Muhammadiyah*.
<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/>.
- PC IMM Sukabumi Jaya. 2018. *Instagram*. 21 Desember. Accessed Desember 01, 2021. https://www.instagram.com/p/Brpm-L0h8Uc/?utm_medium=copy_link.
- PP Muhammadiyah. 2019. *Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Permasalahan HAM di Xinjiang*. Jakarta: PP Muhammadiyah.
- PP Muhammadiyah. 2018. *Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Kekerasan di Uighur*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- . 2019. *Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah Tentang Kekerasan di Uighur*. 19 Desember. Accessed November 08, 2021.
<https://suaramuhammadiyah.id/2018/12/19/pernyataan-sikap-pp-muhammadiyah-tentang-kekerasan-di-uighur/>.
- Pradityo, Rahmadanu. 2020. "Indonesia di Antara Masalah Etnis Rohingya dan Etnis Uighur, 2014-2019." *Indonesian Perspective* 05 (02): 138-158.
- Pradityo, Rahmadanu. 2020. "INDONESIA DI ANTARA MASALAH ETNIS ROHINGYA DAN ETNIS UIGHUR, 2014-2019." *Indonesia Prespective* 05 (02): 138-158.
- Rahayu, Lisyé Sri. 2019. *Muhammadiyah Ungkap Kejanggalan Saat Diajak Tur ke Xinjiang China*. 16 Desember. Accessed November 06, 2021.
<https://news.detik.com/berita/d-4825065/muhammadiyah-ungkap-kejanggalan-saat-diajak-tur-ke-xinjiang-china>.
- Ramadhani, Jabbar. 2019. *Usai Kunjungi Muslim Xinjiang, Ini Langkah Delegasi Indonesia*. 28 Februari. <https://news.detik.com/berita/d-4447233/usai-kunjungi-muslim-xinjiang-ini-langkah-delegasi-indonesia>.
- Ribas. 2019. *Sikap Muhammadiyah dan Cerita Setelah dari Uighur*. 16 Desember. Accessed Oktober 22, 2020.
<https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/16/sikap-muhammadiyah-dan-cerita-setelah-dari-uighur/>.
- Rosaliza, Mita. 2015. "WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF." *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2): 1.
- Sabiila, Syahidah Izzata. 2021. *Gegara Minta Temui Tahanan Uighur, Kunjungan Uni Eropa ke Xinjiang Ditunda*. 17 Maret. Accessed November 06, 2021.
<https://news.detik.com/internasional/d-5496735/gegara-minta-temui-tahanan-uighur-kunjungan-uni-eropa-ke-xinjiang-ditunda>.
- Saputro, Febrianto Adi. 2019. *Din: Bentuk Tim Pencari Fakta Internasional Terkait Uighur*. Jakarta: republika.co.id. Accessed Oktober 23, 2020.
<https://republika.co.id/berita/q2rih6382/din-bentuk-tim-pencari-fakta-internasional-terkait-uighur>.
- Saragih, Muhammad Fajrin. 2015. "TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER." *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Sebayang, Rehia. 2019. *Bela Uighur, Ribuan Warga Hong Kong Demo Pemerintah China*. 23 Desember. Accessed November 2021, 2021.

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191223123219-4-125198/bela-ughur-ribuan-warga-hong-kong-demo-pemerintah-china>.
- Sekarwati, Suci. 2019. *Perkosaan dan Aborsi, Etnis Uighur Buka Suara Kehidupan di Kamp*. 09 Oktober. Accessed November 05, 2021. <https://dunia.tempo.co/read/1257694/perkosaan-dan-aborsi-etnis-uighur-buka-suara-kehidupan-di-kamp/full&view=ok>.
- Suara Muhammadiyah. 2021. *Delegasi Muhammadiyah Kunjungi Muslim Uighur di Xinjiang*. 31 Januari. <https://suaramuhammadiyah.id/2019/03/06/delegasi-muhammadiyah-kunjungi-muslim-uighur-di-xinjiang/>.
- . 2019. *Sikap Muhammadiyah dan Cerita Setelah dari Uighur*. 16 Desember. Accessed November 09, 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/2019/12/16/sikap-muhammadiyah-dan-cerita-setelah-dari-uighur/>.
- Suryanrandika, Rizky. 2019. *Ulama Malayisa Imbau Nnegara Muslim Boikot Produk Cina*. 19 Desember. Accessed November 19, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/q2ui5i320/ulama-malaysia-imbau-negara-muslim-boikot-produk-cina>.
- Susilo, Muhammad. 2020. *Bagaimana China 'manfaatkan' undangan liputan ke Xinjiang untuk mengontrol narasi tentang Muslim Uighur*. 08 September. Accessed November 06, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54025967>.
- Wardah, Fathiyah. 2019. *Amnesty Desak Pemerintah Indonesia Bersuara Keras Bela Etnis Uighur*. Jakarta: VoA Indonesia. doi:<https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-desak-pemerintah-indonesia-bersuara-keras-bela-etnis-uighur/5216460.html>.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, and Syifa Nur Ghonimah. 2020. "Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 05 (10): 1215-1231.

LAMPIRAN :

1. Wawancara dengan Suara Muhammadiyah

Peneliti :
Nama : Armiana Dyfa Ramithamanda
NIM : 18323057
Status : Mahasiswa Aktif

Narasumber :
Nama : Deni Al-Asyari
Jabatan: Pimpinan Perusahaan Suara Muhammadiyah

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana posisi Suara Muhammadiyah dalam organisasi Muhammadiyah? Apakah merupakan badan usaha milik Muhammadiyah atau merupakan badan independen?	1. Pertama terkait posisi Suara Muhammadiyah ini dia badan pusat syiar resmi dari persyarikatan Muhammadiyah yang dia langsung dibawah struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada juga badan-badan pelaksana program-program Muhammadiyah itu yang turunannya dari legal-legal majelis misalnya untuk pendidikan itu berada di bawah Dikdasmen, kalua untuk perguruan tinggi itu di bawah Dikti begitu juga yang lain ada ekonomi, rumah sakit ada PKU, begitu juga sebenarnya ada MPI Majelis Pustaka Informasi juga ada media binaan disitu. Tetapi khusus

	<p>media Suara Muhammadiyah itu langsung dari PP Muhammadiyah karena dia itu memang amal usaha yang langsung didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dulu. Sehingga dia ini lebih tua usianya dari majelis-majelis adanya. Jadi dia ini menjadi badan yang mandiri yang langsung strukturnya dari PP Muhammadiyah.</p>
<p>2. Kalau begitu apakah berita yang dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah sebagai media pers dipantau oleh PP Muhammadiyah? Atau justru Suara Muhammadiyah memiliki kebebasan pers sendiri?</p>	<p>2. Jadi setiap apa yang dipublikasikan oleh Suara Muhammadiyah menjadi suara resmi dari pimpinan Muhammadiyah sendiri, apalagi secara struktural tim redaksinya merupakan ketua umum pimpinan Muhammadiyah, kemudian banyak dari dewan-dewannya dalam struktur Suara Muhammadiyah itu pengurus pusat Muhammadiyah, jadi apa yang akan dipublikasikan oleh Suara Muhammadiyah itu harus melalui screening lah jadi atas persetujuan dari pimpinan Muhammadiyah karena tadi</p>

	fungsinya sebagai suara resmi dari Muhammadiyah.
3. sebagai organisasi independen yang langsung berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, apa visi misi Suara Muhammadiyah?	3. visi misinya itu Suara Muhammadiyah itu, meneguhkan dan mencerahkan visinya ya. Untuk turunan visinya meneguhkan dalam makna lebih orientasi ke internal ke dalam, bagaimana melakukan penguatan dan internalisasi ideologi-ideologi Muhammadiyah dan keIslaman kepada warganya dan kemudian melakukan penguatan-penguatan nilai-nilai paham keagamaan kepada seluruh struktur dan amal usaha di lingkungannya nah lebih kepada membangun komitmen ideologisasi, itu lebih kepada peneguhan artinya lebih kepada bagaimana warganya itu melalui Suara Muhammadiyah ini nah bias membangun gagasan Islam wasathiyah yang menjadi visi besar dari Muhammadiyah itu, nah sedangkan turunan pada visi pencerahan itu lebih

	<p>eksternal ke luar, nah bagaimana nilai-nilai wasathiyah dari ideologi Muhammadiyah yang ke dalam tadi itu mampu mencerahkan umat, warga termasuk bangsa ini. Nah itu yang menjadi visi misi dari Suara Muhammadiyah</p>
<p>4. Isu etnis Uighur sendiri kan sudah di perbincangkan dari tahun 2018 pak, kalau boleh cerita sedikit, informasi apa saja yang sudah didapat oleh sm terkait isu etnis Uighur ini pak?</p>	<p>Memang secara langsung saya pernah ikut dalam pertemuan dengan salah satu, istilahnya kalau di kita kementerian keagamaan lah, namun tidak ada sebenarnya disana kementerian agama itu, tapi memang kementerian yang menangani urusan-urusan agama begitu. Kita sempat beraudiensi sempat bertemu. Artinya kita ingin mengkonfirmasi apa yang terjadi terhadap etnis Uighur itu. Memang Muhammadiyah sangat keras saat itu, saya menyaksikan betul bagaimana Pimpinan Pusat Muhammadiyah termasuk salah satunya bapak anwar abbas yang dari majelis ulama itu, beliau sangat keras</p>

	<p>dalam mengkritik pemerintah Tiongkok waktu itu terhadap perilaku kepada masyarakat Muslim. Nah ini misi awal yang dibawa oleh Muhammadiyah waktu itu bertemu dengan pemerintah Tiongkok, namun ketika kita dialog, salah satu yang disampaikan pejabat Tiongkok dari urusan agama tadi, poin apa yang muncul, opini yang muncul dipermukaan, opini yang muncul di media massa, itu mereka menyebutnya hoax ya. Bahwa itu tidak benar, termasuk diskriminasi agama dan sebagainya yang mereka munculkan adalah bahwa ini merupakan pertarungan ekonomi global, Amerika dan kawasan China, intinya mereka ingin berebut pengaruh di kawasan asia lah, dan Indonesia ya mungkin salah satu pasar yang sangat strategis bagi kawasan di dunia. Dan selama ini mungkin amerika dan eropa yang selama ini mengambil kendali, mereka</p>
--	--

kuatir ada pengalihan arah kiblat kepada kekuasaan Tiongkok maka ya muncul isu-isu ini. Agar ya mungkin karena masyarakat asia termasuk Indonesia yang sangat sensitif dengan soal agama yang mungkin bisa jadi isu ini yang dimunculkan. Dan yang kedua mereka waktu itu, isu ini bukan isu yang pertama katanya, waktu itu kita pada 2018 kalau nggak salah kesana, bukan hanya di 2018 tetapi setiap ada isu-isu perdagangan besar katanya, saya tidak tau apa apa saja yang disebut perdagangan besar saat itu. Nah setiap ada isu-isu perdagangan besar yang akan dikelola oleh bangsa Tiongkok di kawasan asia, selalu muncul isu-isu yang seperti ini, nanti ada lagi, nah setiap ada isu-isu perdagangan isu-isu diplomatic itu selalu muncul. Maka menurut mereka yang disampaikan kepada kita itu bahwa apa yang terjadi itu justru tidak benar karena ya bahkan masyarakat sana menurut versi mereka,

	<p>ya sangat terbuka sangat care dengan praktek keberagamaan. Dan kami waktu itu di bawa ke beberapa komunitas Muslim ya, untuk melihat bagaimana masyarakat Muslim bisa tumbuh ya waktu itu memang di pusat kotanya di Tiongkok makanya di Tiongkok kita pergi beberapa masjid, aktifitas-aktifitas keagamaan, pondok-pondok pesantren, bahkan mereka menyebutkan seluruh biaya aktivitas keberagamaan umat Islam disini ditanggung oleh negara yang notabene mereka adalah komunis gitu ya, ideologinya komunis. Kemudian ini bukan dari mereka ya, ini kita yang berfikir dibelakang. Kita di negara yang Muslim itu aktivitas keagamaan di masjid di pondok pesantren itu tidak ditanggung oleh negara secara penuh seratus persen, nah disana mereka ajak kita ke beberapa pondok pesantren kawasan titik-tik keagamaan dan semua lahan milik pemerintah dan</p>
--	---

	<p>semua pembiayaan dibiayai oleh pemerintah. Pada saat itu, saya juga sempat menulis pada konteks yang pertama itu artinya di negara yang ideologinya komunis justru pemerintahannya sangat care dengan praktek keberagaman, justru kita yang pemerintahannya Muslim tidak sebanding lah meskipun ada tidak sebanding. Itu info pertama yang saya lihat dari respon Muhammadiyah ketika itu dan mendapat informasi dari pemerintahannya, kemudian yang kedua, Muhammadiyah tentunya tidak cukup ya dengan apa yang disampaikan pemerintahan saat itu walaupun mereka sudah menyampaikan bagaimana pemerintah Tiongkok pro dengan aktivitas keberagaman dan dibuktikan dengan adanya berbagai aktivitas keberagaman disana yang sangat terbuka, tp kita ingin tau lebih jauh ke uighurnya sebenarnya kita ingin tau ke Xinjiang itu seperti apa gitu ya dan</p>
--	---

beberapa informasi kedua yang kita dapat ya, bahwa satu yang kita pahami itu, kelompok masyarakat disana kalau kita analogikan itu seperti masyarakat yang tergusur, masyarakat pribumi yang tergusur oleh kebijakan-kebijakan tapi notabene mereka mayoritas Muslim. Nah kemudian ada ketidakpuasan yang kemudian mereka melakukan semacam pemberontakan lah ya dalam tanda kutip, ya kalau saya menganalogikan apakah ini seperti aceh atau seperti papua yang sebenarnya masyarakat pribumi yang tergusur oleh rezim oleh kekuasaan, yang mungkin ada suku yang lebih dominan, yang sebenarnya di China itu ada 54 atau 45 etnis, dan Uighur ini termasuk etnis yang besar dan tuda dan dominan Muslim. Mereka itu secara ekonomi itu tidak bergerak, banyak aktivitas aktivitas mereka tidak menguntukan, nah informasi-informasi ini yang kita temukan sehingga muncul

	<p>semacam ketidakpuasan dan pemberontakan, jadi konteks dari masyarakat Uighur itu bukan konteks keberagamaannya tetapi lebih dilihat pada aspek ekonominya pada saat itu, nah saya tidak tau persis kemudian paham keagamaan karena disana mayoritas Muslim kemudian dikapitalisasi menjadi satu ideologi yang berseberangan dengan pemerintah sebagai cara mereka melawan seperti itu, ya bisa saja gitu kalau mereka ingin membangun simpatik dari masyarakat dunia begitu ya, ya kalau konteksnya sangat lokalitas maka tidak ada mata yang melihat, tapi kalau mereka munculkan isu isu yang sangat sensitif seperti isu keagamaan ya apakah konteks ini akan menjadi sorotan dunia begitu ya, nah saya tidak tau persis dalam konteks itu ya, artinya apakah konteks agama di sini memang dikapitalisasi mereka yang menjadi</p>
--	---

	<p>satu isu di Xinjiang Uighur ini adalah persoalan agama. Tapi informasi dari kunjungan PP itu ya beberapa narasumber ditemui di sana lebih pada aspek ekonomi itu aspek lokal itu</p>
<p>5. apakah saat berkunjung ke Tiongkok bapak melihat tindakan-tindakan diskriminasi keagamaan seperti larangan memelihara jenggot, berjilbab, hingga kesulitan mencari makanan halal?</p>	<p>5. justru saya merasakan disana sangat terbuka sekali, disana saya berkunjung ke masjid terbesar disana, dan itu saya luar biasa, itu kan disana kita kan minoritas sekali ya tetapi waktu itu kita mau aktivitas sholat jumat disana, kalau kita jumat disini kan ya sudah orang masuk adzan begitu kan, disana itu satu jam sebelum sholat jumat itu audio masjid itu sudah keluar pengajian ngaji dan saya merasakan nggak China itu, dan itu luar biasa saya seperti di kampung saya dulu, kalau di kampung-kampung kan setengah jam satu jam heboh itu ya masjid ada aktivitas keagamaan, dan itu saya rasakan nggak ada tertutup seperti itu, dan saat itu saya juga ragu apakah ini karena jumat besoknya saya kesana lagi di sholat</p>

	<p>yang tidak jumat begitu ya dan itu tetap sama, nah itu satu, kemudian saya pergi lagi ke pusat Yayasan masjid dan ponpes yang dikelola oleh China juga tp Muslim dan dia juga cerita di perlihatkan beberapa aktivitas keagamaan mereka, jadi menurut informasi dari mereka , satu yang di Tiongkok itu ya, saya saksi dengan mata kepala saya sendiri, pemerintah Tiongkok itu dalam kontekss keberagaman itu sangat terbuka, tidak ada faktor ini kategori radekal atau sebagainya justru yang saya lihat ketika paham keagamaan ni masuk ke dalam ranah ekonomi atau politik itu cap ekstrimisme terhadap kelompok Islam itu muncul, tetapi kalau aktivitas keagamaan diadakan di ponpes di masjid itu di suPPort di bantu malahan, bantuannya luar biasa, guru guru digaji santri disana gratis, tp catatan yang saya tangkap ya jangan mengarah pada kerah ekonomi jangan mengarah pada</p>
--	---

kerah politik, istilahnya apa saja yang kalian minta saya kasih, sehingga kesan yang saya tangkap termasuk di Uighur itu seperti tesis saya tadi apakah memang yang tadinya faktornya faktor ekonomi politik kemudian agama dikapitalisasi jadi cara mereka melawan yang kemudian membuat pemerintah melakukan diskriminasi terhadap paham Islam itu, nah ya saya ingin tau persis dalam aspek ini karena ini baru analisis saya ya. Karena berbeda di luar itu, di Tiongkok secara umum dengan di Uighur itu berbeda, kalau dibilang Islam didiskriminasi kok pemerintah membiayai saya bilang, seharusnya mereka tidak kasih akses, lahan lahan mereka yang kasih, mana ada di negara kita, Indonesia yang katanya Muslim, yang memberikan akses seluas luasnya untuk pendirian aktivitas keberagamaan nggak ada.belum lagi pembiayaan, disana dengan mata saya, saya menyaksikan

	<p>itu, makanya saat di Uighur berbeda kaget juga ya saya kenapa disini ada diskriminasi, jadi kesimpulan saya karena di pemerintahan ini sepertinya ketika Islam sudah masuk urusan politik dan ekonomi disitulah cap-cap ekstrimisme radikalisme.</p>
<p>6. Setelah kesimpulan yang bapak utarakan, kemudian menurut bapak, dimana posisi Muhammadiyah pada konflik Uighur?</p>	<p>6. pertama sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah ya, satu memang Muhammadiyah meminta urusan dalam negeri Tiongkok ini diselesaikan secara independen tanpa campur tangan kelompok Muslim di luar, yang kedua Muhammadiyah meminta akses keterbukaan informasi, memang ya ada beberapa hal ya kekecewaan pada aspek akses yang terbuka itu tidak ditemui, susah untuk mendapat akses terbuka, di Tiongkok itu kan kita bias kemana-kemana kalau di Xinjiang ini kan tidak terlalu, maka di Muhammadiyah dalam konteks ini</p>

	<p>meminta ada keterbukaan informasi sehingga tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat global dalam konteks etnis Uighur ini, yang ketiga Muhammadiyah dalam konteks keberagaman yang sifatnya ada perlakuan diskriminasi, tetap Muhammadiyah menolak apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, tetapi Muhammadiyah juga melihat jika ini permasalahannya masalah ekonomi politik nah itu yang dituntut Muhammadiyah untuk membuka akses informasi itu agar Muhammadiyah termasuk masyarakat global tidak membawa isu agama di dalam soal politik dalam negeri yang ada di Tiongkok. Karena dalam sisi lain dalam kajian yang ada di Muhammadiyah juga ada konflik ekonomi politik global Muhammadiyah melihat dalam konteks ini. Dan kita juga beberapa mengkaji memang ada beberapa</p>
--	--

	<p>moment isu isu diplomasi isu isu perdagangan selalu memunculkan rentetan ini</p>
<p>7. kalau menurut bapak, Muhammadiyah ini sudah berusaha menjadi aktor perdamaian dunia dengan mencoba memediasi konflik di Filipina dan Thailand, kemudian apa perbedaan konflik Uighur ini dengan konflik lain yang menyebabkan perbedaan sikap Muhammadiyah?</p>	<p>7. pertama saya lihat intensitas Muhammadiyah memberikan opini terhadap Uighur kalau terlihat berkurang karena belum adanya informasi dan kajian serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan Muhammadiyah begitu apalagi belum ada data-data atau fakta lapangan yang belum dapat langsung diakses oleh Muhammadiyah. Nah maka pasca tidak hanya satu kali ya, ada dua tiga kali Muhammadiyah berkunjung ke Xinjiang, ya sebenarnya tujuannya satu menghentikan, yang kedua menjadi mediator sebenarnya jika ini berkaitan dengan faktor keagamaan, nah cuman kesimpulan awal yang dilihat Muhammadiyah saat itu, ini memang tidak sepenuhnya murni seratus persen ini soal persoalan keagamaan, nah ini kemudian yang menjadikan</p>

	<p>Muhammadiyah bias saja berbeda dengan yang di Filipina ya yang itu memang ada aspek ras diskriminasi yang sangat keras disitu, nah yang di China di Uighur ini Muhammadiyah melihat persoalan ini sangat kental ya dengan ya tanda kutip pemberontakan pribumi ya sebenarnya ya. Nah cuman lagi lagi yang belum dapat saya simpulkan itu termasuk Muhammadiyah itu ya apakah memang adanya isu agama yang dikapitalisasi untuk itu. Tetapi Muhammadiyah tetap keras tetap protes, kalau soal apakah Muhammadiyah mendapat sogokan dan lain-lain wah jauh sekali enggak, enggak ada. Bahkan dari masyarakat sana, Muhammadiyah sebenarnya juga membuka akses untuk pendidikan di lingkungan Muhammadiyah termasuk juga Uighur, jadi saya pikir itu saja yang membedakan mbak, murni Muhammadiyah mengambil sikap mengambil opini dari opini yang liat</p>
--	---

	<p>sebelumnya, kemudian yang muncul akhir-akhir termasuk yang terpublish di Suara Muhammadiyah itu hasil hasil atas dasar komunikasi langsung atau primer, fakta di lapangan.</p>
<p>8. baik pak, kalau kembali ke Suara Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah memberikan ruang pada warga Muhammadiyah dalam menyampaikan pendapat tidak pak?</p>	<p>8. jadi Muhammadiyah itu memang ada presentasi publikasi yang di syiarkan begitu. Ya hamper 60 persen itu memang resmi, itu harus keputusan resmi apakah itu ketua umum apakah itu pimpinan yang tiga belas itu apakah majelis majelis. Tetapi yang 40 persen itu lebih ke ruang terbuka, ruang terbuka untuk warganya bahkan tidak hanya warganya, untuk warga di luar Muhammadiyah juga terbuka, bahkan tidak hanya orang Muhammadiyah tidak hanya orang Islam, orang non Muslim pun juga terbuka untuk menulis di Suara Muhammadiyah, beberapa kali kalangan dari non Muslim ya apakah itu dia menulis apakah itu dia menjadi narasumber begitu juga terbuka</p>

<p>9. kalau ada pendapat-pendapat dari warga Muhammadiyah, apakah dalam kurun waktu 2018-2019 ini ada opini dari warga Muhammadiyah terkait isu etnis Uighur ini pak?</p>	<p>9. kalau langsung ke Suara Muhammadiyah itu tidak ada, ya Cuma kalau dialog-dialog di media sosial yang saya lihat yang mereka mungkin banyak kalangan yang tidak sependapat juga dengan apa yang saya sampaikan, karena mereka tetap melihat bahwa ya kekerasan itu benar-benar konflik agama artinya penindasan terhadap Muslim disana, itu banyak yang, dikalangan Kristen itu banyak yang berpendapat seperti itu, yang saya lihat, saya pun di awal juga sama. Tapi memang setelah bertemu ini bertemu ini di lapangan, baca sebagian ya ada beberapa kesimpulan ya tahap awal begini tapi lagi lagi ya untuk kesimpulan 100 persen saya belum berani ya untuk itu.</p>
<p>10. kalau dilihat secara umum pak, pada rentang 2018-2019 ini apakah ada rasa tidak suka dari kalangan Muhammadiyah terhadap pemerintah Tiongkok ini pak?</p>	<p>10. bias dikatakan seperti itu, tapi ya di level bawah ya, bias dikatakan mereka tidak suka dengan artian melihat pada kasus etnis Uighur itu, dan mungkin berkembang baik pada kasus-kasus</p>

	<p>lokal yang belakangan muncul eksodus macam-macam itu, ya jadi semacam meningkat eskalasinya pada konteks ketidaksukaan itu.</p>
<p>11. nah seperti yang diketahui bahwa Muhammadiyah memiliki beberapa kerja sama dengan Tiongkok meskipun tidak langsung dengan pemerintah Tiongkok melainkan lebih pada universitas Tiongkok ya pak, nah apakah ada protes dari warga Muhammadiyah terhadap kerja sama antara Muhammadiyah dengan universitas di Tiongkok pak?</p>	<p>11. kerja sama Muhammadiyah dengan Tiongkok itu memang ada satu yang langsung dengan universitasnya dan ada juga yang langsung dengan pemerintahnya. Dengan pemerintahnya itu lebih kepada aspek pendidikan dan pertukaran, bagaimana masyarakat sana mengerti budaya timur terutama budaya Indonesia budaya Islam, dan mereka juga seperti itu. Saya termasuk yang ikut serta dalam beberapa pertemuan itu ya dengan beberapa pemerintahan yang mewakili. Kemudian yang kedua dengan perguruan-perguruan tinggi itu lebih pada aspek pertukaran pelajar, ya lebih pada aspek kepentingan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi sana ya. Perguruan tinggi sana juga perguruan tinggi yang buka akses itu</p>

	<p>perguruan tinggi yang bagus bagus rata-rata yang sedang- sedang mau tumbuh begitu dan sebagian mereka juga ada kesini. Terkait dengan bagaimana kerja sama dengan perguruan tinggi itu, tidak semua tetapi ada beberapa perguruan tinggi di Muhammadiyah yang dalam tanda kutip mulai tidak terlalu care, tidak tertarik ya, nah ini indikasinya adalah pengurangan ya, indikasinya pengurangan jumlah mahasiswa yang mulai dibatasi, karena kan beberapa kampus ya ada juga yang membuka jor joran untuk kapasitasnya ya, kemudian muncullah kritikan-kritikan dan sebagainya. Ya sekarang mulai dibatasi-dibatasi lah</p>
<p>12. terakhir ni pak, terkait isu etnis Uighur ini, apa saja bantuan dari Muhammadiyah yang diberikan untuk etnis Uighur pak?</p>	<p>12. selain bantuan dana, yang memang agak sulit dulu itu untuk melakukan karena ya aksesnya itu kan dibatasi ya, kita kan juga ada Gerakan bantuan untuk itu. Yang kedua itu pendidikan untuk warga Uighur, kalau tidak salah</p>

	<p>sudah ada beberapa juga yang dari masyarakat itu yang di Indonesia ya itu yang selama ini yang jalan di Muhammadiyah, bantuan-bantuan itu melalui kerja-kerja diplomasi ya ada yang sampai tetapi ya itu agak berat ya memang. Tidak seperti kita yang melakukan bantuan ke ya palestina saja yang begitu berat saja kita masih bisa kita menembus aksesnya ya, tapi yang ini memang sangat ketat banget, itu juga yang membuat saya tidak berani membuat kesimpulan akhir itu, karena saya menemukan dua ruang yang berbeda, ruang di Tiongkok secara keseluruhan begini praktik keberagaman, yang disini seperti ini begitu, nah apa begitu ya, makanya Muhammadiyah yang diminta itu keterbukaan informasi dan akses untuk masuk begitu. Jadi selama ini yang dilakukan Muhammadiyah sudah masuk si sebagian ke Uighur itu.</p>
--	---

Peneliti :

Nama : Armiana Dyfa Ramithamanda
NIM : 18323057
Status : Mahasiswa Aktif

Narasumber :
Nama : Ganis Khoirunnisa'
Jabatan: Sekertaris Bidang Perkaderan PW IPM Jawa Tengah

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah ada upaya dari IPM untuk membela etnis Uighur?	1. oke, isu etnis Uighur ini kan sudah sekitar 2 tahun lalu ya, saya rasa pernah ya saat itu. Untuk tingkat PW sendiri hanya sebatas kita melakukan campaign di media sosial. Kita membuat pamflet dan infografis seputar genologi kekerasan yang ada di Uighur seperti itu, tapi di tingkan temen temen ranting dan daerah ada yang melakukan kampanye dan di tempat lain di luar jawa tengah ada yang melakukan semacam aksi drama kolosal yang ditampilkan di tengah-tengah kota dan lain sebagainya. Untuk penggalangan dana, setau saya itu terpusat di Lazismu tapi tidak terlalu massif saat itu. Lebih pada aksi-aksi seperti itu, kalau di Jawa Tengah kurang ada aksi seperti drama kolosal

	<p>seperti itu, tapi memang kalau kita by personal temen temen Muhammadiyah kalau nggak salah waktu itu di twitter itu memang ramai sekali pro kontra juga seperti yang tadi dibilang tidak hanya seputar masalah agama tapi ada masalah ekonomi politiknya juga, jadi memang temen temen aktivis Muhammadiyah secara personal memang menyuarakan isu Uighur di media sosial terutama di twitter saat itu.</p>
<p>2. kalau di internal sendiri ada tidak diskusi tentang etnis Uighur ini?</p>	<p>2. untuk ditingkat wilayah seingat saya tidak ada diskusi terkait isu etnis Uighur ini ya, tapi memang kita menyampaikan infografisnya ada dan pamfletnya juga ada, tapi kalau secara diskusi nggak ada.</p>
<p>3. kalau PW IPM Jateng sendiri melihat posisi Muhammadiyah dalam konflik ini seperti apa?</p>	<p>3. kalau saya pribadi melihat posisi Muhammadiyah menjadi serba salah ya, Muhammadiyah ini kan mau menempatkan diri sebagai mediator yang memfasilitasi antara Uighur dengan Tiongkok maupun masyarakat mancanegara. Namun memang posisi</p>

	<p>seperti itu rawan untuk di hitam dan putihkan padahal posisinya hanya sebatas mediator. Dan menurut saya langkah yang diambil Muhammadiyah itu sejauh ini tepat ya walaupun memang banyak penggorengan isu tadi ormas islam di sogok dan lain sebagainya. Saya rasa itu hanya sebagai resiko dari sikap wasathiyah yang diambil Muhammadiyah dalam menyikapi isu Uighur ini.</p>
<p>4. ada tidak kritik dari aktivis Muhammadiyah kepada kerja sama antara Tiongkok dan Muhammadiyah?</p>	<p>4. yang jelas pasti ada. Seperti yang kita tau, Muhammadiyah itu kan isinya orang orang yang latar belakangnya heterogen ya, majemuk banget, jadi katakanlah ada yang muda, Muhammadiyah dahlan, ada yang muda, Muhammadiyah salaf, ada yang muda, Muhammadiyah NU, yang artinya mereka memiliki latar belakang bahkan paradigma yang berbeda dengan Muhammadiyah dahlan yang asli artinya katakanlah sikap kita dengan tetap berhubungan baik secara</p>

	<p>dalam bidang Pendidikan maupun sosial dengan pemerintah China itu kan langkah kita sebagai organisasi yang mencerahkan. Dalam artian ketika kita dalam konflik ya bagaimana kita merekonsiliasi dengan orang-orang yang berkonflik itu, Muhammadiyah ingin menunjukkan Muhammadiyah sebagai Gerakan pencerahan oleh sebab itu Muhammadiyah tetap menjalin kerja sama dalam bidang Pendidikan maupun sosial, tetapi seperti yang aku bilang di awal bahwa latar belakang masyarakat Muhammadiyah itu kan macam-macam ya, jadi jarang sekali ada yang murni wasathiyah yang melihat dari segala macam pandangan itu sedikit sekali. Jadi pasti ada masyarakat yang berpemikiran sempit yang akan memandang bahwa apa yang dilakukan muhammadiyah itu bertentangan atau tidak menyepakati bahkan kecewa dengan sikap Muhammadiyah. Tapi</p>
--	---

	<p>yang saya rasa, sikap Muhammadiyah sudah baik dengan tetap berhubungan baik dengan Tiongkok seperti itu. Karena sekali lagi dakwahnya Muhammadiyah itu kan dakwah mencerahkan seperti itu ya, tapi memang sangat tipis ya jika dikatakan kita pro China atau kita hanya sebatas bekerja sama, itu kan sangat tipis ya, nah mungkin ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat awam di Muhammadiyah bahwa kita sebenarnya tidak pro China tapi kita tetap menjalani hubungan baik bukan dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun.</p>
<p>5. kalau ada kritikan ke Muhammadiyah, kira kira ada nggak kritikan ke Indonesia?</p>	<p>5. jangankan ke Muhammadiyah yah, maksudnya ke Muhammadiyah saja ada apalagi ke pemerintah Indonesia yang mungkin dari dulu sudah membangun hubungan bilateral dengan pemerintah China begitu. Saya rasa itu ada ya, mungkin bahkan itu lebih santer begitu ya, atau saya rasa itu</p>

	<p>dipengaruhi juga oleh sekat perpolitikan pada 2019, orang-orang yang kontra dengan Jokowi begitu kan ya dalam Muhammadiyah akan menganggap Jokowi pro China dan lain sebagainya atau pun sebaliknya. Saya rasa itu lebih santer terdengar di antara masyarakat Muhammadiyah bahkan aktivis Muhammadiyah dibandingkan dengan orang-orang yang kecewa dengan keputusan Muhammadiyah untuk tetap berhubungan baik dengan Tiongkok. Sepertinya masih lebih banyak yang benci dengan pemerintah Indonesia karena masih menjalin hubungan bilateral dengan China.</p>
<p>6. dari keterangan yang telah diberikan, apakah kira-kira ada sentiment anti Tiongkok atau kebencian dengan pemerintah Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah dalam kurun waktu 2018-2019?</p>	<p>6. kalau di antara tahun itu. Saya rasa ada. Karena mungkin Gerakan anti China, yang sempat booming dalam beberapa tahun lalu itu kan seperti gunung es, maksudnya isu isu anti China dimulai dari isu-isu PKI kemudian diperparah dengan</p>

	<p>kontestasi perpolitikan di Indonesia seperti itu, diperparah dengan berbagai paham yang mirip dengan paham komunis di Indonesia, sehingga membuat orang-orang Muslim di Indonesia atau katakanlah orang Muhammadiyah menjadi waswas atau khawatir berlebihan terhadap China, saya rasa itu pasti akan ada orang-orang yang anti China. Jadi anti China ini menurut saya sudah dipupuk bukan hanya masalah Uighur saja jadi banyak sekali hal hal yang menyebabkan orang-orang ini menjadi anti China begitu.</p>
<p>7. kemudian jika ada sentiment anti Tiongkok, kira kira bentuk sentiment anti Tiongkok tersebut seperti apa ?</p>	<p>7. kalau sepemahamku itu tergantung umur ya, katakanlah untuk orang-orang yang baby boomer, itu mereka akan lebih sering mengeshare entah itu hoax atau nggak hoax di grup whatsapp keluarga atau grup whatsapp yang lain terkait sentiment anti Tiongkok dan itu sering terjadi, saya rasa semua anak yang punya orang tua dan pakde budhe pasti pernah mengalami ini gitu kan ya,</p>

	<p>itu untuk usia yang boomer atau baby boomer begitu. Untuk dibawahnya lagi milenial atau generasi z, anti nya itu lebih kalau saya melihatnya lebih selektif jadi kalau boomer atau baby boomer lebih membabi buta, sekali anti China ya tetap anti China kaya gitu kan ya, kalau generasi kita milenial atau generasi z kita kan lebih selektif, artinya kita menimbang dulu apakah itu hoax, kalau hoax maka tidak akan di share atau tidak akan dikasih feedback atau pendapat. Tapi kalau kemudian itu merupakan isu yang memang itu kesalahannya Tiongkok atau harus di adili atau harus di bela ya kemudian generasi z atau generasi milenial ini bisa speak up gitu kan, jadi saya rasa perbedaannya disitu kalau generasi muda lebih pada konteksnya bukan pada atribut Chinanya. Jadi kalau itu melanggar HAM ya harus kita bela, ketika itu kemudian merugikan Indonesia ya harus kita bela.</p>
--	--

Peneliti :
 Nama : Armiana Dyfa Ramithamanda
 NIM : 18323057
 Status : Mahasiswa Aktif

Narasumber :
 Nama : Agung Danarto
 Jabatan: Sekertaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Sebagai organisasi dengan prinsip Amar Ma'ruf Nahu Mungkar, bagaimana Muhammadiyah menanggapi isu etnis Uighur?</p>	<p>1. Pertama, permasalahan Uighur ini dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama adalah sisi kemanusiaan, dimana disitu ada hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari sisi politik, dimana politik antara China berhadapan dengan politik Barat ya Eropa dan Amerika. Lalu berkaitan dengan sisi kemanusiaannya, PP Muhammadiyah beberapa kali ke China dan selalu berdialog dengan komunitas Muslim yang ada di sana baik itu komunitas semacam MUI nya Indonesia itu MUInya China kemudian dengan komunitas Muslim di Xinjiang yang Uighur itu, kita berdialog, berdiskusi dan lain sebagainya. Barangkali memang ada hal yang harus</p>

difahami bahwasanya di China itu keberagamaannya polanya agak berbeda dengan yang ada di luar China. Bahwa keberagamaan itu hak asasi setiap manusia, Cuma China mengartikan kebebasan hak asasi itu dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa. Kalau anak-anak itu harus mengikuti aturan negara, sehingga karenanya anak-anak itu belum memiliki hak untuk beragama sehingga untuk ke Masjid, sholat di tempat umum dan lain sebagainya itu memang dilarang. Itu perspektif dari masyarakat Muslim di sana pun seperti itu ya, kemudian kalau mengenai kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi kemudian isunya kan kekerasan ya itu di sana, kekerasan, kemudian di paksa untuk makan-makanan haram dan lain sebagainya nah tentu dalam aspek itu tentunya Muhammadiyah kan jelas ya sikapnya ya dalam kaitannya dengan itu kan

tidak setuju, menentang, cuma ini kan wilayah negara lain, wilayah China, yang bukan wilayah Indonesia, sehingga kita bisanya hanya melakukan himbauan-himbauan agar pemerintah China bisa berlaku adil, bisa berlaku baik terhadap mereka, nah untuk itu permintaan Muhammadiyah yang kemudian dikabulkan oleh China kan membuka akses, ya China perlu membuka akses ke Uighur agar ormas-ormas Islam bisa kesana bahkan mungkin juga wisatawan-wisatawan, itu bisa masuk kesana itu dan kemudian akses itu kan relatif dibuka oleh China, walaupun mungkin saya juga tidak tahu, ada bagian-bagian tertentu yang disembunyikan, tapi saya kira itu umum berlaku di China dimana saja ya, karena negara tirai bambu, itu mungkin bagian wilayah mana saja, bukan hanya yang ada di Islam saja tetapi yang lain mungkin juga ada yang disembunyikan, kita juga berkunjung

ke pesantren yang ada di Uighur itu, kalau dilihat sekilas kunjungan kita ya baik-baik saja, cuma yang di luar itu kita tidak tahu, apa yang tidak kita lihat, sehingga kalau dari sisi kemanusiaan, Muhammadiyah memang sikapnya jelas mengharapkan pemerintah China bisa sepenuhnya memberikan hak asasi kepada masyarakat Uighur, termasuk juga tidak dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah kemudian yang Muhammadiyah harus ekstra hati-hati adalah kalau dari sisi politik. Karena China dengan Barat itu kan perspektifnya tentang Uighur itu kan bertolak belakang, diametral. Nah ketika diametral itu kan kemudian kita menjadi bertanya apa sesungguhnya yang terjadi, karena ketika informasi diberikan oleh kedua kelompok yang saling bermusuhan mesti kebenaran tidak ada disalah satu pihak itu, ada aspek yang di Barat benar yang di China benar dan lain sebagainya.

	<p>Apalagi itu kan isunya berbarengan dengan isu terorisme, isu Al-Qaeda dan lain sebagainya yang dipakai oleh Barat untuk menghancurkan komunitas Muslim di mana saja, bukan hanya di China tetapi juga di Irak di banyak tempat lah seperti itu, sehingga itu perlu ekstra hati-hati dan Muhammadiyah perlu lebih melihat dalam aspek itu yaitu aspek internal ya masalah domestik dari China, karena kita tidak ingin masuk terlalu dalam pada konflik China dan Barat itu.</p>
<p>2. Apa saja yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam upayanya membantu etnis Uighur?</p>	<p>2. Tidak mudah ya membantu sana itu ya, sebagaimana saya kira, membantu wilayah dimana pun juga kalau tidak seizin dengan pemerintah resmi itu kan ya tidak mudah, seperti bagaimana Muhammadiyah ke Burma itu, itu kan juga tidak mudah ketika pemerintahnya menghalangi, nah di China ini kan juga begitu juga, Muhammadiyah mau masuk ke sana kan relatif tidak bisa, sehingga Muhammadiyah belum</p>

	<p>banyak melakukan itu kecuali seperti himbauan-himbauan kepada pemerintah begitu, yang lain masih belum.</p>
<p>3. Setelah isu tersebut, apakah berdampak pada hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan Muhammadiyah?</p>	<p>3. sejauh ini tidak ya, sejauh ini hubungannya tetap terjalin dengan komunikasi baik. Kemudian beasiswa mahasiswa Indonesia atau mahasiswa Muhammadiyah tepatnya di Tiongkok juga tetap berjalan sampai sekarang, sehingga dalam aspek itu tidak mengganggu hubungan dengan Muhammadiyah.</p>
<p>4. Dari berbagai aksi dari kalangan Muhammadiyah, apakah ada kritik dari kalangan Muhammadiyah terkait hubungan Muhammadiyah dengan Tiongkok?</p>	<p>4. mungkin kalau ada ya wajar ya, satu dua, kan tidak harus semua orang sepakat dengan itu, tapi saya kira tidak mengganggu proses kerjasama yang sudah terjalin baik antara Muhammadiyah dengan Tiongkok maupun dengan universitas-universitas yang ada. Karena sekarang ini sedang lumayan banyak dosen-dosen S3 yang sedang kuliah lanjut di Tiongkok jumlahnya lumayan banyak dan saya</p>

	<p>kira itu menambah perspektif banyaknya pelajar Muhammadiyah yang belajar di berbagai tempat di luar negeri. Jadi itu masih tetep jalan dan nyaris tidak ada problem, kecuali problemnya covid kemarin karena ketika covid, mahasiswa kita banyak yang pulang ke tanah air sampai sekarang ya masih kuliah daring dan bimbingan harus daring begitu jadi lebih karena problem teknis bukan karena problem politik yang kurang baik begitu.</p>
<p>5. Menurut Bapak, apakah ada sentiment anti Tiongkok dari kalangan Muhammadiyah dalam kurun 2018-2019?</p>	<p>5. kalau sentiment anti Tiongkok itu kan naik dan turun ya, sejak dulu di sejarah Indonesia kan selalu seperti itu naik turun karena isu komunisnya, kemudian karena isu dominasi China di berbagai tempat dan lain sebagainya itu kan memang naik turun apalagi jika perbincangannya itu menjelang bulan September ketika menjelang peringatan kesaktian Pancasila, G30S PKI, pasti perbincangan isu anti</p>

	<p>komunis kemudian anti China kemudian merebak, di Indonesia secara umum potensinya akan seperti itu, tapi kan di sisi lain kita juga harus realistis ya. Dunia kedepan itu kan dominasinya bukan hanya dunia Barat, Eropa dan juga Amerika, dominasinya China juga mulai dominan. Bahkan pada beberapa prediksi ini kan Barat itu akan mulai decline dan China akan mulai naik. Ini kan kita juga harus realistis terhadap seperti itu, saya kira ya harus melihat semuanya dengan pemikiran luas, berwawasan dan lain sebagainya supaya kita tidak menjadi korban konflik antara Barat dengan Timur. Tetapi kita juga bisa menyerap perkembangan-perkembangan yang ada termasuk juga kerjasama dan lain sebagainya. Saya kira kalau berbicara mengenai realita bukan lagi di Utopia begitu, saya kira memang mau tidak mau harus membuka hubungan kerjasama dengan China begitu, ya</p>
--	--

	<p>mungkin kalau ada yang anti itu ya masih perlu wawasan dari kita bahwa kita tidak hidup di alam Utopia tapi di alam yang nyata, dan itu saya kira akan selalu ada karena ada yang memelihara anti Barat atau anti China akan selalu ada tergantung momentumnya apa saya kira. Di Indonesia kan seperti itu ada yang sangat anti Barat ada yang sangat anti China dan lain sebagainya.</p>
<p>6. Mungkin karena memang warga Muhammadiyah ini sangat heterogen ya pak jadi memiliki banyak argument yang berbeda-beda?</p>	<p>6. iya betul, di Muhammadiyah kan memang heterogen sekali dan masing-masing memiliki kebebasan dalam berpikir, kebebasan berpendapat tidak harus satu kata dengan pimpinannya jadi ya berbeda itu ya biasa saja tidak menjadi suatu masalah yang serius.</p>
<p>7. dari pandangan bapak selama 2018-2019. Bagaimana bentuk sentiment anti Tiongkok dari beberapa kalangan di Muhammadiyah?</p>	<p>7. di Muhammadiyah sentiment anti Tiongkok mungkin juga dipengaruhi oleh pilpres 2019 dimana ada dominasi 9 naga yang itu orang-orang etnis China disitu yang paling tinggi, dominasi China di ekonomi Indonesia yang kemudian memunculkan sikap</p>

	<p>anti China begitu, kemudian yang kedua berita-berita di media terkait tindakan-tindakan yang melanggar HAM yang ada di Uighur itu juga ada tidak sedikit juga yang seperti itu, cuma ya informasinya di medsos itu kan begitu luar biasa, begitu gencar dan lain sebagainya cuma kan kadang kadang di medsos itu kan susah untuk memverifikasi, validasinya kan susah sekali, ini bener atau tidak, ini konteksnya kepada umat Islam atau bukan dan lain sebagainya itu agak susah memverifikasi. Tapi saya kira dengan China dua hal itu, yang pertama adalah dominasi China di perekonomian Indonesia yang kemudian menyebabkan sikap yang anti China. Kemudian mungkin juga banyak datangnya pekerja China membuka perusahaan-perusahaan pertambangan dan lain sebagainya itu termasuk pada poin satu itu. Kemudian</p>
--	---

	<p>yang kedua itu tadi isu-isu hak asasi manusia yang ada di China.</p>
<p>8. Dengan banyaknya kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok, apakah ada kritikan dari warga Muhammadiyah ataupun PP Muhammadiyah kepada pemerintah Indonesia pak?</p>	<p>8. saya kira Muhammadiyah ini kan selalu meminta pemerintah ini juga berkonsentrasi dengan pemberdayaan UMKM, yang UMKM ini kan rata-rata ya masyarakat pribumi, bukan hanya dominasi kelompok-kelompok konglomerat tertentu juga yang lainnya juga iya. Kemudian yang kedua tentunya dalam mencari investasi asing supaya mengembangkan tidak hanya dominasi Tiongkok tetapi juga negara-negara yang lain khususnya Timur Tengah itu perlu dilirik juga agar terjadi keseimbangan pada investasi asing yang masuk ke Indonesia.</p>
<p>9. untuk terkait penyelesaian konflik Uighur ini apakah ada kritikan terhadap pemerintah pak?</p>	<p>9. kalau itu hanya saran saja, Muhammadiyah pernah memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar dapat menekan pemerintah China agar dapat berlaku adil terhadap masyarakat Uighur.</p>